

**PERAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM PENANGANAN
PASCA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEIFAKSI**

Oleh
Akmal Mori Amrin

B 401 22 155

SKRIPSI

**Dalam rangka penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas tadulako**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO**

. 2025

***THE ROLE OF THE PALU CITY GOVERNMENT IN
HANDLING POST-EARTHQUAKE, TSUNAMI, AND
LIQUEFACTION***

***By :
Akmal Mori Amrin
B40122155***

THESIS

***In the context writing thesis
to obtain a Bachelor of Government Science
at Faculty of Social and Political Science
Tadulako University***



***GOVERNMENT SCIENCE STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
TADULAKO UNIVERSITY
PALU
2025***

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM PENANGANAN PASCA
GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI**

Oleh

AKMAL MORI AMRIN
B 401 22 155

SKRIPSI

Dalam rangka penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Palu.

November 2025

Pembimbing I



Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, M.Si
NIP. 196703211992032003

Pembimbing II



Dwi Maya Loka Zainuddin M.SiP.,M.A
NIP.199306092025062001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Ilmu Pemerintahan


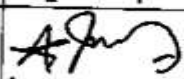
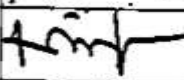

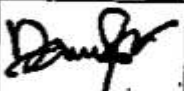


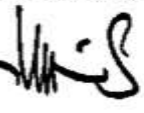
Dr. Yunus, S.Sos.,M.Si
NIP. 197304022008121003

HALAMAN PERSETUJUAN

Di terima oleh Panitia Ujian Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, untuk memenuhi sebagai syarat syarat guna memperoleh gelar sarjana:

Nama : AKMAL MORI AMRIN
 Stambuk : B40122155
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Hari/Tanggal : Kamis, 27 November 2025
 : Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa
 Judul Skripsi : Bumi, Tsunami, Dan Likucifaksi

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Nurhannis, M.Si NIP.196412111989031002	Ketua	
2.	Harianto Lamading, S.IP., M.Si NIP.198405082025211053	Sekretaris	
3.	Dr. Yunus, S.Sos.,M.Si NIP.197304022008121003	Penguji Utama	
4.	Dr. Siti Chaeriah Ahsan, M.Si NIP. 190703211992032003	Pembimbing Utama	
5.	<u>Dwi Maya Loka Zainuddin</u> <u>M.S.IP.,M.A</u> NIP. 199306092025062001	Pembimbing Pendamping	

Palu, 1 Desember 2025
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

 Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si
 NIP.197504172006041002

PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, atau doctor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palu, 27 November 2025
Yang membuat pernyataan



Akmal Mori Amrin
B40122155

ABSTRAK

Akmal Mori Amrin, Nomor Stambuk **B 401 22 155**, judul: “peran pemerintah kota palu dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi” di bawah bimbingan Ibu **Sitti Chaeriah Ahsan**, sebagai pembimbing I dan Ibu **Dwi Maya Loka Zainuddin** sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kota Palu dalam penanganan pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likueifaksi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek dari (Ryaas Rasyid 2010) dengan empat indikator peran pemerintah, yaitu: Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan informan kunci dari pemerintah dan lembaga terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menjalankan keempat peran tersebut secara terintegrasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti koordinasi lintas sektor, integrasi data, dan pendampingan pascarelokasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator

ABSTRACT

*Akmal Mori Amrin, Number of Stamp B 401 22 155, title: "The Role of the Palu City Government in Post-Earthquake, Tsunami, and Liquefaction Management" under the guidance of Mrs. **Sitti Chaeriah Ahsan** as the first supervisor and Mrs. **Dwi Maya Loka Zainuddin** as the second supervisor. This study aims to determine and analyze the role of the Palu City Government in post-earthquake, tsunami, and liquefaction management. In this study, the author uses the theory of Ryaas Rasyid (2010) with four indicators of government roles, namely: Regulator, Dynamicator, Facilitator, and Catalyst. This study uses a qualitative research method with a descriptive type. The informant determination technique uses purposive sampling with key informants from the government and related institutions. Data collection is carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis is carried out through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Palu City Government has implemented these four roles in an integrated manner, although it still faces challenges such as cross-sector coordination, data integration, and ongoing post-relocation assistance.*

Keywords: *Regulator, Dynamicator, Facilitator, and Catalyst*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “peran pemerintah kota palu dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi”. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk jenjang strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Penulis mengakui bahwa dalam proses pendidikan serta penulisan skripsi ini tidaklah mudah untuk dicapai, penuh dengan hambatan dan tantangan. Namun, dengan usaha keras, ketekunan dalam mengerjakan skripsi, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah berjuang selama hidupnya dan telah membesarkan dengan segala upaya, sabar, dan ikhlas mengiringi setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih yang setulus- tulusnya mengalir kepada Mama Marwiah tercinta, terkasih yang senantiasa selalu berjuang untuk anak-anaknya agar bisa menyekolahkan anak-anaknya, memberikan pendidikan yang lebih, selalu memberikan dukungan, rasa kasih sayang, materi dan selalu memberikan doa demi keberhasilan dunia akhirat penulis dengan sepenuh jiwa raganya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan dan teruntuk Bapak Mori Amrin yang sudah mengorbankan banyak waktunya dan telah banyak

berjuang untuk anak-anaknya, dari subuh sampai sore bapak selalu bekerja dengan mama tercinta. Kedua orang tua penulis telah berjuang mencari nafkah dan mereka tidak peduli hujan, panas teriknya matahari kedua orang tua saya tetap bekerja dan selalu melakukan yang terbaik buat anak-anaknya dan sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memenuhi segala kebutuhan penulis. Semoga kedua orang tuaku bangga dengan perjuangan yang mampu menyekolahkan anak bungsu mu hingga Sarjana. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik. Alhamdulillah berkat doa Mama dan Bapak, penulis dapat menyelesaikan studi (S1) sesuai dengan amanat dan keinginan kedua orang tua yang telah menjadi harapan mereka, dengan penuh rasa syukur penulis dapat mencapainya saat ini. Ucapan terima kasih juga kepada Sang istri tercinta, Saudara-saudara penulis, adik ipar, dan keluarga besar penulis yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing Ibu Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, M.Si selaku pembimbing I serta terima kasih kepada ibu Dwi Maya Loka Zainuddin M. S.IP., M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing selama penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kesibukan dan pekerjaan tetap bersedia membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan ide, kritik dan saran serta solusi pada setiap permasalahan dan kesulitan, selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada tim penguji, Bapak Dr. Nurhannis, M.Si. selaku ketua, Bapak Dr. Yunus S.Sos., M.Si selaku penguji utama, dan . selaku sekretaris Harianto Lamading S.I.P., M.Si. Terima kasih untuk

tim penguji yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di ujian penulis, dan memberikan saran yang baik selama proses pendidikan penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak berbagai pihak yang selama ini telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Sebagai bentuk penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka izinkanlah penulis mengungkapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Amar S.T, MT.,IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tadulako.
 2. Bapak Dr. Muh. Nawawi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
 3. Bapak Dr. Mohammad Irfan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
 4. Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan
 5. Ibu Dr. Rismawati, S.Sos., MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
 6. Bapak Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
 7. Bapak Dr. Abdul Hamid S.Sos M.Si Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi
- Terima kasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan baik teori maupun praktek dan segenap Staf Tata Usaha dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses perkuliahan.

8. Bapak Dr. Yunus S,Sos.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
9. Terima kasih kepada Selaku Keapala Kabag Pemerintahan Kota Palu yang memberikan izin meneliti dan menginformasikan tentang peran pemerintah kota palu pasca bencana.
10. Terima kasih kepada Kepala Kabag 2 BPDB Kota Palu dan para anggotannya,
11. Terima kasih kepada Kabag 3 Dinas social Kota Palu
12. Terima kasih kepada kasih ibu Nirnawita, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi
13. Terimah kasih kepada Yusran S.I.P, Anggi purna S.I.P, Fahmil, Dan Surya Gunawan Yang sudah membantu dalam segala urusan di kampus.
14. Terimah kasih kepada teman-teman kelas F angkatan 2022 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam proses menempuh pendidikan S1 dan terima kasih atas kerja samanya dalam hal mengejar pendidikan
15. Terima kasih kepada seluruh Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses perkuliahan dan terima kasih atas semua pelajaran serta pengalaman yang telah kalian berikan kepada penulis.
16. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat yang dalam hal ini belum bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dilimpahi berkat atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan Rahmatnya selalu.

Semoga semua dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik bagi semua pihak dan mendapat balasan yang baik serta Rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Palu, 27 November 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the name Akmal Mori Amrin.

Akmal Mori Amrin B40122155

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERYATAAN	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Peneliti	5
1.3.1 Tujuan Peneliti	5
1.3.2 Kegunaan Peneliti	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.1.1 Penelitian Terdahulu	6
2.1.2 Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan	9
2.1.2.1 Pemerintah	9
2.1.2.2 Peran Pemerintah dalam penanganan bencana	14
2.1.2.3 Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuefaksi	19
2.1.2.4 Pembangunan Pasca Bencana dan Peran Pemerintah Daerah	23
2.2 Alur Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian	28
3.1.1 Dasar Penelitian	28
3.1.2 Tipe Penelitian	28

3.2 Defenisi Konsep	29
3.3 Jenis Data	30
3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.4.1 Sumber Data	30
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	32
3.6 Analisis Data	32
3.7 Penentuan Lokasi Peneliti	34
3.8 Waktu Dan Jadwal Penelitian	34
BAB IV <u>DESKRIPSI WILAYA PENELITIAN</u>	36
4.1 Kondisi Geografis	36
4.2 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palu	38
4.3 Sejarah Kota Palu	40
4.3.1 Sejarah Sebelum Kemerdekaan	40
4.3.2 Sejarah Setelah Kemerdekaan	41
4.4 Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Palu	42
4.5 Gambaran Umum Bencana 28 September 2018 di kota Palu	46
4.6 Kronologi dan Dampak Bencana (Gempa, Tsunami, Likuifaksi)	47
4.7 Tantangan Dalam Implementasi Peran BPBD Kota Palu	60
4.8 Upaya Optimalisasi Peran BPBD Kota Palu Dalam masa Pemulihan	62
4.9 Tugas Dan Wewenang BPBD Kota Palu	64
BAB V <u>PEMBAHASAN</u>	66
5.1 Regulator	66
6.2 Dinamisator	74
5.3 Fasilisator	82
5.4 Katalisator	89
BAB VI <u>PENUTUP</u>	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan alur pikir	26
Gambar 2 : Model interaktif dalam analisis data	33
Gambar 3 : Letak Geografi Kota palu	36
Gambar 4 : Struktur Organisasi Kota Palu	43
Gambar 5 : Gambaran Lokasi Likueifaksin	50

DAFTAR TABEL

Tabel : 1 Rekapitulasi data kondisi bangunan akibat gempa, Tsunami dan Likuefaksi kita palu 2018	52
Tabel : 2 Rekapitulasi data korban bencana alam gempa bumi, Tsunami dan Likuefaksi tahun 2018	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu pemerintahan, peran dimaknai sebagai seperangkat fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh suatu entitas, dalam hal ini pemerintah, untuk memenuhi kepentingan publik. Menurut (Ryaas Rasyid 2010), peran pemerintah tidak terbatas pada penyelenggaraan administrasi publik semata, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk perumusan kebijakan, pelayanan publik, pengaturan (regulasi), dan yang krusial adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah merupakan manifestasi konkret dari kehadiran negara, khususnya ketika masyarakat menghadapi situasi krisis dan darurat, seperti bencana alam.

Pemerintah memiliki mandat untuk menjalankan roda pemerintahan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Secara khusus, Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki otonomi luas untuk mengelola wilayahnya, termasuk aspek penanggulangan bencana. Fungsi ini menjadi ujian nyata bagi kapasitas pemerintahan daerah ketika dihadapkan pada suatu krisis multidimensi. Dalam menghadapi ujian ini, Pemerintah Kota Palu tidak bekerja dalam ruang hampa. Efektivitas penanganan bencana justru sangat bergantung pada kolaborasi multi-pihak yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga seperti BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta aktor non-pemerintah

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan kerjasama internasional seperti Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). Kolaborasi ini menjadi tulang punggung dalam membangun ketahanan dan mempercepat pemulihan.

Indonesia, sebagai negara yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia (BNPB). Data menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana alam di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu peristiwa bencana paling kompleks dan memorakporandakan dalam sejarah Indonesia modern adalah bencana yang melanda Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018. Peristiwa ini merupakan kombinasi dari tiga bencana sekaligus gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter, tsunami, dan fenomena likuifaksi (pencairan tanah) yang menyapu sebagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.

Dampak yang ditimbulkan sangat masif. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2019) mencatat lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, 4.000 orang luka-laki, dan lebih dari 200.000 warga terpaksa mengungsi. Kota Palu mengalami kehancuran yang parah pada hampir semua sektor: infrastruktur fisik hancur, aktivitas ekonomi terhenti, serta trauma sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakatnya.

Dalam konteks penanganan pascabencana, koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan proses pemulihan. Penanganan pascabencana di Kota Palu melibatkan banyak aktor lintas level dan

lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kota Palu sebagai otoritas terdekat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Pemerintah Pusat melalui BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, serta lembaga penegak keamanan seperti TNI dan Polri. Pada tahap awal pascabencana, BNPB menetapkan status *state of emergency* dan menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai koordinator operasional melalui skema *command and control* yang kemudian diimplementasikan oleh BPBD Kota Palu. TNI dan Polri dilibatkan secara intensif dalam operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), evakuasi korban, stabilisasi keamanan, serta pendistribusian bantuan logistik. Di tingkat daerah, berbagai OPD memiliki peran teknis spesifik, seperti Dinas PUPR yang menangani rekonstruksi infrastruktur dasar, Dinas Sosial yang mengelola data penyintas, dapur umum, dan bantuan sosial, Dinas Kesehatan yang memastikan pelayanan kesehatan darurat dan pengendalian penyakit, serta BPBD yang menjadi pusat koordinasi kebencanaan di tingkat kota.

Dalam situasi demikian, fase penanganan pasca bencana menjadi tantangan utama yang menentukan seberapa cepat sebuah komunitas dapat pulih. Menurut Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011, penanganan pascabencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur tetapi juga memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai otoritas terdepan, Pemerintah Kota Palu memikul tanggung jawab besar untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses pemulihan ini. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi inilah kolaborasi lintas sektor diuji, mulai dari penyediaan hunian tetap (*huntap*) hingga pengembangan kebijakan

penanggulangan bencana yang selaras dengan rencana pembangunan daerah. Namun, meski kerangka kolaborasi telah terbentuk, implementasi di lapangan tidak berjalan mulus. Berbagai laporan dari lembaga kemanusiaan dan media menyoroti sejumlah masalah krusial, seperti keterlambatan pembangunan hunian tetap (hunatap), distribusi bantuan yang tidak merata, serta koordinasi antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah yang belum optimal. Fakta bahwa hingga tahun 2023 sebagian korban masih bermukim di hunian sementara (hunlara) dan belum mendapatkan kepastian atas lahan serta rumah yang layak mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara respons pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak, yang juga merefleksikan tantangan dalam mengonsolidasikan berbagai inisiatif kolaboratif menjadi sebuah aksi yang terpadu dan efektif.

Permasalahan ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan kultural dalam tata kelola pemerintahan pascabencana. Pemerintah Kota Palu dituntut memiliki kapasitas manajerial, koordinatif, dan kolaboratif yang kuat, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, dan Likueifaksi” menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks *governance* dan manajemen bencana, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan

yang aplikatif bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons bencana alam di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait peran pemerintah kota palu dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami, dan likueifaksi?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Peneliti

1.3.1 Tujuan Peneliti

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis model peran pemerintah kota palu dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami, dan likueifaksi.

1.3.2 Kegunaan Peneliti

Kegunaan penelitian diharapkan, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan pada Studi Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan Peran pemerintah dan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai satu diantara bahan rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang sejenis dengan metode penelitian yang berbeda.
- b. Secara praktis, Sebagai bahan acuan bagi pemerintah Kota Palu dalam melihat kebijakan Undang-Undang Penanggulangan bencana sebagai upaya penanganan untuk jangka panjang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

- a. Eryna Syahadatina Alibtila Badar (2023) dalam penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Rehabilitasi Pertanian Pasca Gempa Bumi Cianjur", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran serta strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi sektor pertanian pasca terjadinya bencana gempa bumi. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memainkan peran yang krusial dan multidimensional, mulai dari sebagai perencana, fasilitator, hingga implementor dalam pemulihan lahan, distribusi bantuan, dan pendampingan kepada petani. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan teori yang relevan dengan fokus studi, yaitu teori peran pemerintah atau teori implementasi kebijakan publik. Penelitian ini dan penelitian saya memiliki kemiripan karena menggunakan metodologi yang sama (kualitatif deskriptif), hanya saja lokasi penelitian, objek spesifik (rehabilitasi pasca-bencana vs. kepemimpinan di era digital), dan teori yang digunakan berbeda.

- b. Danny Permana (2023) dalam penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran serta efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kebijakan dan aksi penanggulangan risiko bencana banjir. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, yang meliputi aspek kebijakan, koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat, memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptif daerah terhadap ancaman banjir. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian saya karena menggunakan metodologi yang sama, hanya saja fokus objek penelitian (penanggulangan banjir vs. kepemimpinan organisasi) dan teori utama yang digunakan (misalnya teori *Governance* atau *Disaster Risk Management* vs. teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass) berbeda.
- c. Andi Pangeran (Satriawan 2023) dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan Logistik dalam Upaya Penanganan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme, kendala, serta efektivitas pengelolaan logistik pada fase tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana multidimensi di Palu. Penelitian ini mengadopsi

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, akurasi data kebutuhan, dan distribusi logistik menjadi faktor kunci sekaligus tantangan utama dalam pengelolaan logistik bencana. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas aspek manajemen dan operasional logistik yang merupakan bagian dari fungsi manajemen krisis organisasi. Penelitian ini dan penelitian saya memiliki kemiripan karena sama-sama berfokus pada kemampuan organisasi dalam mengatasi krisis, hanya saja lokasi penelitian dan objek spesifik (logistik vs. kepemimpinan) yang berbeda

- d. Syaikh Fathurahman (2022) “Gaya Kepemimpinan Anies Baswedan Dalam Upaya Penanganan Banjir Dan Pandemi Covid-19 DKI Jakarta”
Perbedaan penelitian saya dan Penelitian terdahulu penelitian saya membahas tentang Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi murni mengatasi dampak fisik dan kemanusiaan. Sementara penelitian Anies Baswedan menganalisis gaya kepemimpinan umum (bukan spesifik transformasional) dalam dua krisis berbeda (banjir *dan* COVID-19) di lingkup provinsi (DKI Jakarta) dengan kompleksitas multi-sektor, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian terdahulu memiliki kemiripan karena menggunakan metodologi yang sama, Tetapi lokasi penelitian yang digunakan berbeda.

2.1.2 Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan

2.1.2.1 Pemerintah

Pemerintah adalah suatu badan, organisasi, atau sistem yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur, memerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi dalam suatu komunitas terorganisasi, umumnya sebuah negara. Pemerintah memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan kebijakan serta undang-undang yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat dalam wilayah tertentu. Dalam pengertiannya, pemerintah juga merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi dan sebagai mekanisme penentuan kebijakan. Pemerintah biasanya terdiri dari tiga lembaga utama yakni legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili). Pemerintah menjalankan kekuasaannya berdasarkan aturan konstitusi atau hukum dasar negara dan bertanggung jawab melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Criestian, 2004).

Menurut (Marlen Novita Makalew, 2021) pemerintah adalah organisasi yang memegang hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi dalam suatu negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintah dan merupakan wadah pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang mengatur negara serta menjaga kedamaian dan keamanan baik dari dalam maupun luar negara. Jadi, pemerintah bukan sekadar alat administratif, tapi lembaga yang sangat berkuasa dalam pengelolaan negara dan

masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi pemerintah adalah kekuasaan yang sah dan tertinggi dalam sebuah negara.

pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memerintah dan melaksanakan kekuasaan secara sah melalui berbagai organ dan lembaga negara. Dalam pandangan ini, pemerintah bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan tapi juga pengelola dan pengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi tercapainya tujuan negara.

Menurut (Handayani dkk., 2023) pemerintah adalah suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia dapat diperintah. Pemerintah merupakan alat atau organisasi yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan memerintah masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai tubuh yang bertanggung jawab mengelola sumber daya dan mengatur interaksi sosial dalam masyarakat melalui kekuasaan yang sah.

Menurut (Osborne, D., & Gaebler, T, 1992) pemerintahan mewujudkan dampaknya melalui empat komponen utama, yang dikenal sebagai "4I": *Integrity & Accountability (Integritas dan Akuntabilitas)*, *Inspirational Vision (Visi yang Inspiratif)*, *Innovative Governance (Tata Kelola yang Inovatif)*, and *Inclusive Participation (Partisipasi Inklusif)*. *Integritas dan Akuntabilitas* berarti pemerintah berperan sebagai institusi yang terpercaya dan bermoral, menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan

di antara warga negaranya. Visi yang Inspiratif terwujud melalui kemampuan pemerintah dalam menyampaikan visi masa depan bangsa yang menarik dan menantang, dengan memanfaatkan simbol serta narasi yang memicu semangat kebangsaan dan gotong royong. Tata Kelola yang Inovatif melibatkan pemerintah dalam mendorong inovasi dan kreativitas birokrasi dengan menantang prosedur lama, mendorong pemikiran analitis, serta mengadopsi metode baru dalam memecahkan masalah publik. Partisipasi Inklusif berarti pemerintah memberikan perhatian dan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat, memberdayakan mereka untuk terlibat aktif dalam pembangunan

Dampak positif dari pemerintahan transformasional telah banyak dicatat dalam studi-studi terbaru. Gaya pemerintahan ini selalu dihubungkan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kepercayaan pada institusi pemerintah, serta efektivitas kebijakan yang lebih baik. Warga negara di bawah pemerintahan transformasional cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi, menunjukkan tingkat kepatuhan dan kewargaan yang lebih tinggi seperti mematuhi peraturan dan membayar pajak dengan sadar, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Dalam konteks tantangan kontemporer, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintahan transformasional terbukti efektif dalam mempertahankan kohesi sosial, semangat kolektif, dan konsentrasi

pada tujuan bangsa meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (Bouckaert, G., 2022).

Pemerintahan juga menghadapi tantangan dan kritik. Beberapa penelitian menyoroti potensi risiko seperti ketergantungan berlebihan pada karisma seorang pemimpin politik, yang dapat menciptakan kerentanan dalam sustainability kebijakan jika pemimpin tersebut lengser. Ada juga kekhawatiran tentang "sisi gelap" jika visi pemerintah bersifat otoriter atau tidak etis atau jika pengaruhnya digunakan untuk manipulasi massa demi kekuasaan. Selain itu, peran pemerintah mungkin menghadapi beban fiskal dan birokratis yang signifikan dalam upaya mereka untuk terus-menerus berinovasi dan melayani. Implementasinya juga membutuhkan konsistensi, waktu, dan energi yang besar dari seluruh jajaran birokrasi, dan mungkin kurang efektif dalam situasi yang sangat stabil dan rutin di mana pendekatan pemerintahan tradisional yang prosedural lebih sesuai (Pollitt, C., & Bouckaert, G., 2017).

Pemerintahan transformasional tetap menjadi paradigma yang sangat relevan dan kuat dalam teori dan praktik administrasi publik kontemporer. Kemampuannya untuk membangkitkan partisipasi warga, mendorong inovasi kebijakan, membangun tata kelola yang bersih, dan memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan global yang kompleks menjadikannya sangat berharga di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Meskipun memerlukan pemahaman yang cermat tentang tantangannya, potensinya untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan bangsa

menuju kinerja pembangunan dan kesejahteraan yang lebih tinggi menjadikannya model pemerintahan yang terus dipelajari dan diupayakan penerapannya dalam berbagai konteks kenegaraan (Ansell & Torfing, 2018).

Peran Pemerintahan merupakan suatu model tata kelola yang bersifat visioner, dengan fokus pada menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan warganya untuk melampaui kepentingan pribadi atau golongan demi mencapai tujuan bangsa yang lebih besar, melalui pembentukan nilai, sikap, dan perilaku baru berbasis good governance. Gaya ini diimplementasikan melalui empat komponen utama (4I) (Osborne & Gaebler, 1992): *Integrity & Accountability* (menjadi panutan integritas dan transparansi), *Inspirational Vision* (mengkomunikasikan visi bangsa yang memotivasi), *Innovative Governance* (mendorong inovasi serta efisiensi birokrasi), dan *Inclusive Participation* (memperhatikan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat). Keuntungannya meliputi peningkatan kepercayaan publik, efektivitas pelayanan, kinerja birokrasi, partisipasi masyarakat, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan efektivitas dalam situasi krisis seperti pandemi.

Dalam penanganan bencana alam, peran pemerintah menjadi krusial karena kemampuannya menggerakkan respons kolektif di tengah chaos. Melalui *Idealized Influence*, pemimpin (seperti Gubernur Palu) membangun kepercayaan dengan menjadi panutan integritas di saat krisis. *Inspirational Motivation* memobilisasi semangat korban dan relawan lewat visi pemulihan yang jelas. *Intellectual Stimulation* mendorong solusi inovatif

untuk masalah darurat (misal: logistik pengungsian), sementara *Individualized Consideration* memastikan kebutuhan spesifik kelompok rentan (lansia, anak, disabilitas) terpenuhi. Keunggulannya terletak pada pembentukan ketahanan psikologis masyarakat dan efisiensi koordinasi tim multidisiplin dalam situasi dinamik, mempercepat pemulihan jangka panjang. tantangan yang ada.

2.1.2.2 Peran Pemerintah dalam penanganan bencana

Peran pemerintah adalah dasar penting dan fondasi utama dalam seluruh proses penanganan bencana, dari fase persiapan hingga pemulihan. Secara esensial, peran pemerintah mencakup kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengkoordinasi, dan menjalankan kebijakan serta operasi penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam kondisi krisis yang sarat dengan ketidakpastian dan tekanan tinggi (Abdul Haris Ahmadi, 2023). Pemerintah dalam konteks ini tidak hanya perlu memiliki kapasitas teknis dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus memiliki legitimasi, kewenangan hukum, serta kemampuan untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi jumlah korban dan kerusakan properti.

Peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat krusial karena merupakan otoritas utama yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan seluruh proses manajemen bencana mulai dari pencegahan,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Pemerintah yang efektif mampu memobilisasi sumber daya nasional, menetapkan kerangka hukum dan kebijakan, mengambil keputusan strategis di tengah ketidakpastian, serta memastikan koordinasi yang optimal antar semua pihak yang terlibat. Pemerintah harus memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dan kemampuan adaptasi tinggi untuk menghadapi situasi krisis yang dinamis dan penuh tekanan (Rustanti, 2024).

Pemerintah berperan dalam merancang dan menetapkan regulasi serta rencana kontinjensi darurat nasional dan daerah, mengadakan pelatihan dan simulasi bencana secara terstruktur, serta membangun dan menjaga sistem komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat dan jejaring relawan. Peran pemerintah yang responsif dan kolaboratif dapat memperkuat jaringan antar lembaga dan sektor sehingga informasi dan sumber daya bantuan dapat disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan terhindar dari duplikasi. Hal ini penting untuk meminimalisir dampak bencana dan mempercepat proses evakuasi serta distribusi bantuan (Fadhilah dkk., 2025).

Pemerintah harus mampu menjadi pengarah utama dalam operasi penyelamatan, triase, dan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah dituntut untuk mampu mengambil keputusan kritis dalam kondisi penuh tekanan dan ketidakpastian, serta memastikan koordinasi semua tim agar tetap fokus pada tujuan

penyelamatan nyawa dan pengurangan kerugian. Kapasitas kelembagaan pemerintah yang adaptif dan komunikatif sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi dengan perkembangan situasi yang cepat berubah di lapangan (Putra dkk., 2023). Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana mencakup beberapa poin penting:

1. Menetapkan kerangka hukum, kebijakan, dan strategi nasional penanggulangan bencana.
2. Memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya nasional (APBN/APBD, logistik, personel TNI/Polri).
3. Mengambil keputusan strategis dan operasional di tengah ketidakpastian.
4. Memimpin koordinasi dan membangun kolaborasi lintas sektor dan dengan masyarakat.
5. Menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.

Koordinasi dan pengorganisasian sumber daya merupakan tugas sentral pemerintah. Bencana seringkali memunculkan respons yang kacau dari berbagai lembaga dan relawan. Di sinilah pemerintah berperan sebagai integrator utama, membangun dan memimpin mekanisme komando dan kendali yang jelas (seperti penerapan Sistem Komando Penanggulangan Bencana - SKPB), memastikan alokasi sumber daya (logistik, personel, dana) tepat sasaran, serta menghilangkan duplikasi dan kesenjangan dalam

bantuan (Chen dkk., 2018). Tanpa koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah secara efektif, upaya tanggap darurat bisa menjadi tidak efisien, bahkan kontraproduktif, seperti terhambatnya distribusi bantuan atau tumpang tindihnya intervensi.

Menurut (Suwandi, 2023) Komunikasi yang jelas, akurat, dan transparan dari pemerintah merupakan peran yang vital. Pemerintah bertanggung jawab sebagai sumber informasi resmi yang menyampaikan situasi bencana terkini, tingkat risiko, instruksi evakuasi, serta perkembangan respons kepada publik, media, dan antar lembaga. Komunikasi pemerintah yang buruk dapat memicu kepanikan, menyebarkan misinformasi, merusak kepercayaan publik, dan menghambat kerja sama. Pemerintah yang baik mampu menyederhanakan informasi kompleks, menyampaikannya melalui saluran yang tepat dan terpercaya, serta aktif mendengarkan umpan balik dari masyarakat terdampak.

Pemerintah juga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat di bawah tekanan berdasarkan kewenangannya. Dalam situasi darurat bencana, waktu sangat berharga dan informasi seringkali terbatas. Pemerintah di tingkat nasional dan daerah dituntut untuk mampu menganalisis situasi secara cepat, menimbang risiko dan manfaat, serta membuat keputusan kritis yang berdampak besar pada keselamatan jiwa, seperti menetapkan status darurat, memerintahkan evakuasi skala besar, atau mengerahkan sumber daya militer. Ketegasan dan kemampuan berpikir

jernih di tengah chaos adalah kualitas esensial dari para pembuat keputusan di dalam pemerintah (Rahmanto dkk., 2022).

Peran pemerintah yang bersifat visioner dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam tahap pemulihan dan rekonstruksi. Pemerintah tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga menjamin peralihan yang lancar menuju pemulihan jangka panjang dengan menggerakkan anggaran dan sumber dayanya. Ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan perumahan, mengembalikan layanan fundamental (pendidikan, kesehatan), mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, serta yang paling penting, mendorong program pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang berketahanan untuk masa depan (Suciati, 2020). Pemerintah yang efektif akan memimpin evaluasi pascabencana, merevisi kebijakan, dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Peran pemerintah yang efisien adalah dasar penting dan penggerak utama di semua tahap penanggulangan bencana, mulai dari persiapan hingga rehabilitasi. Pemerintah berfungsi sebagai penentu kebijakan strategis, pemegang otoritas tertinggi, dan pengintegrasi utama berbagai pihak dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Tanpa kehadiran dan peran pemerintah yang kuat, legitimate, dan didukung oleh kapasitas kelembagaan serta sumber daya yang memadai, usaha penanganan bencana dapat berisiko menjadi tidak teratur, tidak terkoordinasi, dan kurang efektif, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan jumlah korban jiwa serta kerusakan. Esensi peran pemerintah terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi sumber daya material dan manusia dari tingkat nasional hingga daerah, memimpin koordinasi antar sektor (pemerintah, LSM, masyarakat, swasta) secara efektif, dan membangun sistem penanggulangan bencana yang kolaboratif dan kokoh untuk memastikan respons yang cepat, adil, dan tepat sasaran.

2.1.2.3 Gempa Bumi, Tsunami Dan Likueifaksi

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, baik berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis. Penting untuk membedakan antara bahaya alam (natural hazard) dan bencana alam (natural disaster). Bahaya alam adalah fenomena alam itu sendiri, seperti gempa bumi, banjir, atau badai, yang sifatnya belum tentu merusak. Suatu bahaya alam baru dikategorikan sebagai bencana ketika fenomena tersebut mengenai populasi yang rentan, sehingga memicu kerusakan dan gangguan yang luas. Dengan demikian, bencana alam adalah hasil dari interaksi antara fenomena alam dan kerentanan manusia (selamet muchsin, 2017)

Secara umum, bencana alam diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan likuifaksi; (2) bencana hidrometeorologis seperti banjir, badai, angin puting beliung, dan kekeringan; (3) bencana klimatologis seperti gelombang panas dan kebakaran hutan skala besar;

serta (4) bencana biologis seperti wabah penyakit. Faktor utama terjadinya bencana-bencana tersebut dipengaruhi oleh proses dinamis bumi, atmosfer, serta perubahan iklim global yang semakin memperbesar frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem (Ajhari dkk., 2023).

a. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam litosfer, sehingga menghasilkan gelombang seismik. Gempa dapat disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik (gempa tektonik), aktivitas vulkanik (gempa vulkanik), atau runtuh bawah tanah. Gempa tektonik merupakan jenis yang paling umum dan menjadi pemicu awal rangkaian bencana yang terjadi di Palu. Guncangan kuat dari gempa inilah yang memicu fenomena lanjutan berupa tsunami dan likuifaksi

b. Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang terbentuk akibat adanya gangguan di dasar laut, seperti gempa tektonik bawah laut, longsor bawah laut, letusan gunung api bawah laut, atau jatuhnya meteor. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat mencapai ketinggian besar ketika mendekati pantai. Pada kejadian Palu 2018, tsunami terjadi akibat patahan tektonik di dasar Teluk Palu yang memicu gelombang tinggi dan menerjang kawasan pesisir Kota Palu dalam waktu yang sangat singkat.

c. Likuifaksi

Likuifaksi (liquefaction) adalah fenomena geologi ketika tanah berbutir halus dan jenuh air kehilangan kekuatan akibat guncangan gempa, sehingga berperilaku seperti cairan. Ketika likuifaksi terjadi, permukaan tanah dapat bergerak, mengalir, atau mengalami penurunan drastis, yang menyebabkan bangunan, pepohonan, serta infrastruktur terseret atau tenggelam. Fenomena ini merupakan salah satu yang paling jarang terjadi secara masif, tetapi di Palu 2018 likuifaksi menyeret dan menghancurkan kawasan seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bencana alam merupakan kategori besar dari fenomena merusak, sedangkan gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi adalah jenis bencana geologis dengan mekanisme yang berbeda namun dapat saling berkaitan. Pemahaman terhadap perbedaan konsep ini penting dalam analisis penanganan pascabencana, terutama terkait peran pemerintah dalam merespons kondisi multidimensi yang ditimbulkan oleh rangkaian bencana tersebut.

Menurut (Fadhilah dkk., 2025) Bencana alam dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama:

1. Geologis: Gempa Bumi (contoh: Aceh 2004), Tsunami (contoh: Palu 2018), Letusan Gunung Api (contoh: Krakatau 1883), Tanah Longsor.
2. Hidrometeorologis: Banjir (contoh: Jakarta 2020), Kekeringan (contoh: Afrika Timur 2011-2012), Angin Topan/Siklon/Topan (contoh: Topan Haiyan 2013), Badai Tropis.

3. Klimatologis: Gelombang Panas, Kebakaran Hutan dan Lahan (contoh: Australia 2019-2020).
4. Biologis: Wabah Penyakit (pandemi seperti COVID-19 sering dikaitkan, meski penyebab utamanya biologis, dampaknya bisa seperti bencana alam), Serangan Hama Pertanian Luas. Setiap jenis memiliki karakteristik, pola kejadian, dan wilayah rawan yang berbeda-beda.

Dampak bencana alam bersifat multidimensi dan seringkali parah. Dampak fisik langsung meliputi korban jiwa, luka-luka, kerusakan atau kehancuran infrastruktur (rumah, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit), fasilitas publik, dan lahan pertanian. Dampak sosial meliputi pengungsian besar-besaran, hilangnya mata pencaharian, gangguan pendidikan, trauma psikologis, dan peningkatan kerentanan kelompok tertentu (anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas). Secara ekonomi, bencana menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya kemiskinan, dan mengganggu rantai pasok. Dampak lingkungan mencakup degradasi lahan, pencemaran air dan udara (misalnya dari kebakaran hutan), hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem yang dapat bertahan lama. (Safitri dkk., 2025)

Mengurangi risiko bencana alam memerlukan pendekatan komprehensif melalui mitigasi dan adaptasi. Mitigasi bertujuan mengurangi potensi dampak bencana sebelum terjadi, dengan tindakan seperti pembuatan tata ruang berbasis risiko, penerapan bangunan tahan gempa/gempa/banjir, sistem peringatan dini yang efektif, reboisasi, dan

pelestarian ekosistem pesisir (mangrove) sebagai benteng alami. Adaptasi fokus pada penyesuaian untuk hidup dengan risiko bencana yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, terutama dalam konteks perubahan iklim. Ini termasuk diversifikasi mata pencaharian, pengembangan tanaman tahan kekeringan, sistem irigasi yang efisien, pendidikan kebencanaan masyarakat, dan rencana kontinjensi yang teruji. Kerangka global seperti *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)* menekankan pentingnya investasi dalam pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola, dan peningkatan ketahanan masyarakat. (Siregar & Wibowo, 2019).

2.1.2.4 Pembangunan Pasca Bencana dan Peran Pemerintah Daerah

Pembangunan pasca bencana (PPB) merupakan proses kompleks yang melampaui sekadar rekonstruksi fisik. PPB bertujuan untuk membangun kembali masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang terkena dampak bencana dengan pendekatan yang berkelanjutan dan tangguh. Tujuannya bukan hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi membangun kembali dengan lebih baik (*build back better*) untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana di masa depan (BMPB, 2020)

Menurut (Bappenas, 2006) PPB dimulai setelah fase tanggap darurat berakhir dan berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang. Cakupannya sangat luas, meliputi: pembangunan kembali permukiman dan infrastruktur vital (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit), pemulihan ekonomi dan mata pencaharian, pemulihan sosial-budaya dan psikososial,

restorasi lingkungan, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana di tingkat lokal. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan tidak ada sektor atau kelompok masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran sentral dan strategis dalam pelaksanaan PPB. Sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat terdampak, Pemda memiliki pemahaman kontekstual yang lebih baik tentang kebutuhan, kerentanan, dan potensi lokal. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara eksplisit menegaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam semua fase penanggulangan bencana, termasuk pasca bencana. Pemda bertindak sebagai *leading sector* di wilayahnya. (Wulan Mahardhika Gerungan, 2007)

Peran krusial Pemda adalah mengkoordinasikan seluruh aktor yang terlibat dalam PPB di wilayahnya, termasuk kementerian/lembaga pusat, lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Pemda bertanggung jawab menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RARR) Daerah yang rinci, realistis, berbasis kebutuhan, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD). Perencanaan yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memastikan prinsip *build back better* serta pengurangan risiko bencana (PRB) terintegrasi.

Pemda memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan PPB secara langsung maupun melalui kontrak dengan pihak ketiga. Ini termasuk

pembangunan infrastruktur publik, fasilitas sosial, dan program pemulihan ekonomi. Pemda juga bertanggung jawab memberikan kemudahan perizinan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah dan fasilitas umum, dengan tetap memastikan standar teknis dan kawasan yang aman dari bencana (BMPB, 2020) Pemda perlu memobilisasi sumber daya lokal dan mengelola bantuan dari pusat dan luar daerah secara efektif dan transparan. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pemda memainkan peran vital dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam seluruh proses PPB, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan skema padat karya sangat penting untuk pemulihan ekonomi dan rasa memiliki. Selain itu, Pemda harus memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan lembaga daerah lainnya, serta mengintegrasikan PRB ke dalam semua sektor pembangunan daerah pasca bencana untuk meningkatkan ketangguhan jangka panjang (Gabor & Brooks, 2017).

Pemda bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan PPB di wilayahnya. Hal ini mencakup kemajuan fisik, penyerapan anggaran, dampak sosial-ekonomi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan prinsip *build back better*. Pemda harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana dan sumber daya PPB, serta menyampaikan laporan perkembangan secara rutin kepada pemerintah pusat (melalui BNPB) dan masyarakat. Pengawasan yang ketat mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran (Wahyuningroem & Fitriyah, 2024).

2.2 Alur Pikir

Dalam upaya mengatasi permasalahan dalam perumusan masalah penelitian, konsep penelitian peneliti sendiri atau teori yang dianggap relevan dengan topik atau judul penelitian digunakan sebagai alur berpikir.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji peran pemerintah kota palu dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Dengan menggunakan teori (Ryaas Rasyid 2010) antara lain:

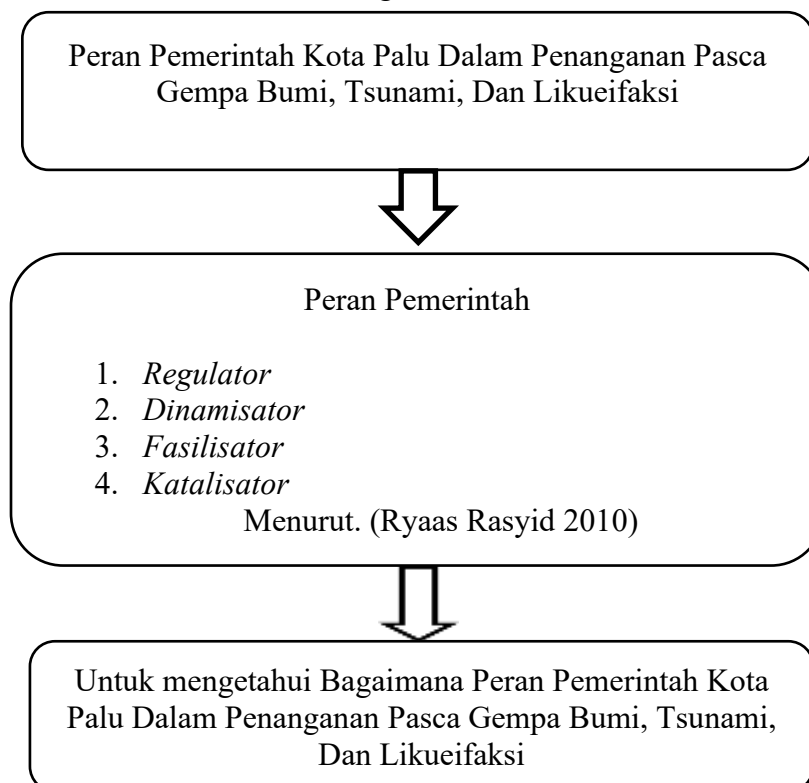
- a. Regulator Peran pemerintah sebagai pembuat dan penegak regulasi. Dalam konteks penanganan pascabencana, ini berarti menyusun peraturan-peraturan darurat, standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan, tata ruang darurat, dan kebijakan lain untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pemulihan.
- b. Dinamisator Peran pemerintah sebagai penggerak dan pemacu pembangunan. Pemerintah bertindak memobilisasi semua sumber daya (manusia, keuangan, logistik) dan memastikan seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terkoordinasi, terarah, dan mencapai target yang ditetapkan.
- c. Fasilitator Peran pemerintah sebagai pemberi kemudahan dan pelayanan. Pemerintah berfungsi menyediakan akses bagi korban dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pendirian posko pengaduan, percepatan perizinan

rebuild, penyediaan data, serta menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan bantuan dari berbagai pihak.

- d. Katalisator Peran pemerintah sebagai pemicu dan pemberdaya masyarakat. Peran ini menekankan pada upaya pemerintah untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat, memberdayakan mereka agar tidak hanya menjadi obyek bantuan tetapi menjadi subyek yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemulihan untuk menciptakan keberlanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir penelitian ini digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian

3.1.1 Dasar Penelitian

Dalam studi ini penulis berkeinginan untuk melakukan pengumpulan data secara langsung. Tujuan dari penelitian lapangan adalah mengumpulkan informasi dan wawasan secara langsung dari subjek tanpa perantara. Peneliti di sini memanfaatkan metode kualitatif untuk memperoleh data atau informasi secara langsung. Metode penelitian yang diterapkan untuk menganalisis keadaan inheren objek, penelitian kualitatif berlandaskan pada pemikiran pasca positivisme. Pengambilan sampel data secara purposif diterapkan dalam penelitian kualitatif, dan peneliti berfungsi sebagai instrument (Hanyfah dkk., 2022)

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Rusandi M. Muhammad Rusli, 2021) metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam tanpa memanipulasi variabel, dengan mengandalkan data kualitatif seperti narasi, dokumen, atau observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi dengan fokus pada pola kepemimpinan, strategi kebijakan, dampak terhadap pemulihan bencana, serta respons masyarakat terhadap tindakan pemerintah pascagempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Palu. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan

pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan untuk memberikan gambaran holistik tentang peran gubernur dalam memimpin rehabilitasi infrastruktur, penanganan pengungsi, dan penguatan ketahanan masyarakat.

3.2 Defenisi Konsep

Berdasarkan teori-teori yang telah dibahas, maka definisi gagasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori (Rayaas Rasyid 2010) yang menyatakan bahwa ada empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peran Pemerintah. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Regulator Peran sebagai pencipta regulasi dan kebijakan untuk menjamin ketertiban dan keadilan. Dalam penanganan bencana, peran ini diwujudkan melalui penerbitan peraturan darurat, SOP, dan kebijakan rekonstruksi.
- b. Dinamisator Peran sebagai penggerak dan pemobilisasi seluruh potensi sumber daya masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali.
- c. Fasilitator Peran sebagai penyedia sarana, prasarana, dan kemudahan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Pada masa pascabencana, berupa penyediaan hunian, bantuan logistik, kesehatan, dan akses kepada pemulihan ekonomi.
- d. Katalisator Peran sebagai pemicu dan percepat perubahan serta inovasi menuju kondisi yang lebih baik. Contohnya dengan menerapkan teknologi tahan gempa, membangun sistem peringatan dini, dan menciptakan tata kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

3.3 Jenis Data

Menurut (Waruwu dkk., 2025) Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data primer, data ini diperoleh melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaannya penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang di teliti, dan selain itu dapat juga melihat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini.

3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Menurut (Undari Sulung, 2024) Sumber data meliputi data primer, yaitu informasi yang diterima secara langsung atau di tempat penelitian melalui informan dan selanjutnya diolah, dan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam bentuk referensi dan dokumen terkait. Dalam penelitian ini digunakan dua kategori sumber data, yaitu:

1. Data Primer yaitu informan adalah data yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara mendalam kepada informan. Yang dimaksud dengan informan adalah objek penelitian atau responden yang akan

memberikan jawaban kepada peneliti terhadap apa saja yang dipertanyakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive, teknik ini dimaksud untuk menentukan informan dari orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

1. Bachtiar, S.STP Sebagai Kabag Pemerintahan Kota Palu
 2. Samsir, S.H Kabid Rekonstruksi & Rehabilitasi BPBD Kota Palu
 3. Farid A. Modjo Kabig 3 Dinas Sosial Kota Palu
 4. Nirnawati, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi ibu
 5. Suryanti Lestari Sebagai Masyarakat penerima Huntap Tondo
 6. Lespa Selpia Sebagai Masnyarakat Penyintas Bencana
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, situs web pemerintah, buku serta sumber lainnya. Data sekunder memiliki sifat tetap dan biasanya tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti karena sumber informasinya tidak dari sumbernya langsung.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu, suatu cara kompleks yang dilakukan peneliti agar mendapat data yang akurat serta dari berbagai proses yang biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting dalam teknik observasi ini adalah pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara (interview) yaitu cara seorang peneliti mendapatkan data yang akurat dengan turun langsung ke lapangan dengan metode wawancara. Teknik ini sangat akurat karena peneliti akan mengetahui secara mendalam persoalan atau masalah yang diteliti.
3. Dokumen yaitu salah satu data yang akurat agar mengetahui hal-hal atau bukti secara tertulis berupa catatan, notulen rapat, transaksi buku, surat kabar, catatan biografi dan sebagainya. Yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang menjadi salah satu perangkat untuk menggali data primer dari informan dalam sebuah penelitian. Dapat pula diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, menggunakan alat dokumentasi serta alat tulis menulis untuk mengumpulkan data, daftar cocok atau (*checklist*) atau pedoman wawancara, lembar pengamatan, atau panduan pengamatan (*observation schedule*).

3.6 Analisis Data

Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah prosedur pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Teknik deskriptif digunakan dalam analisis data penelitian ini. "Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan

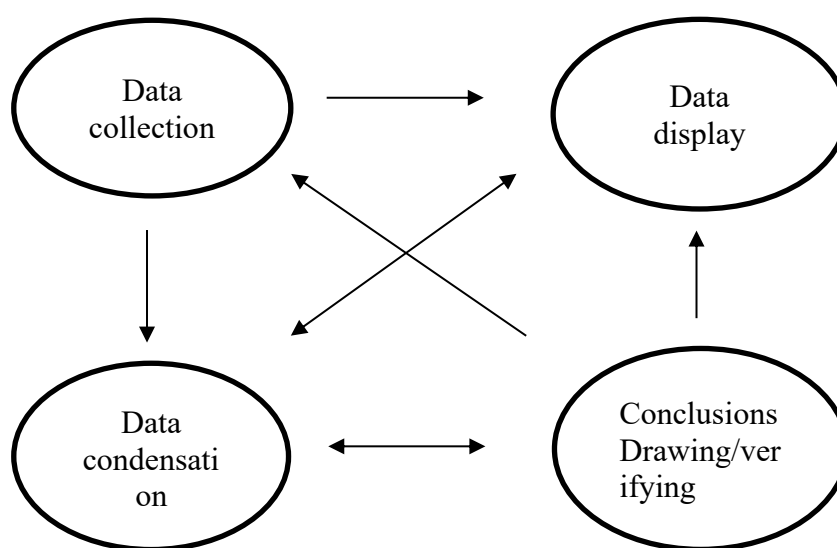
lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain."

Menurut (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014) dalam analisis data kualitatif terdapat tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Kegiatan dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*) yaitu informasi yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan yang dibagi menjadi dua bagian: refleksi dan deskripsi.
2. kondensansi data (*data condensation*), Proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan konversi data yang mencakup setiap aspek catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, dan materi empiris dikenal sebagai kondensasi data. Sebagai kesimpulan, peneliti melakukan wawancara, mengumpulkan data lapangan tertulis, dan kemudian menyusun transkrip wawancara untuk menentukan alur studi yang diperlukan sebelum mencapai kondensasi data ini.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu Salah satu elemen kunci analisis data kualitatif adalah penyajian data. Proses pengumpulan, penataan, dan pemadatan informasi atau data ke dalam format yang lebih mudah dipahami seperti tabel, grafik, matriks, diagram, atau bentuk visual lainnya dikenal sebagai penyajian data
4. Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*) Peneliti mengembangkan kesimpulan sejak awal pengumpulan data, termasuk dengan mencatat aturan

penjelasan, proses kausal, dan interpretasi bebas pola. Pada tahap terakhir, semua data yang dikumpulkan dari peneliti dikompilasi.

Gambar 2
Model Interaktif Dalam Analisis Data



Menurut (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014)

3.7 Penentuan Lokasi Peneliti

Lokasi yang di jadikan objek dalam penelitian yaitu Kota Palu. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa di samping mudah memperoleh data, penelitian ini juga berskala kecil sehingga dapat di laksanakan dengan biaya yang relative kecil.

3.8 Waktu Dan Jadwal Penelitian

Kota Palu menjadi lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena lokasi penelitian ini berskala kecil, biaya yang dikeluarkan relatif minimal, dan mudah dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan waktu

dan jadwal penelitian ini mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi waktu yang dibutuhkan peneliti dibandingkan dengan waktu yang tersedia.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYA PENELITIAN

Peneliti mengawali pembahasan terkait deskripsi wilayah penelitian yang akan menyajikan gambaran umum mengenai Kota Palu sebagai lokasi penelitian. Pembahasan dimulai dengan kondisi geografis wilayah, yang terletak di Teluk Palu dan dikelilingi oleh deretan pegunungan, membuatnya rentan terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Selanjutnya dipaparkan secara singkat sejarah Kota Palu untuk memberi konteks terhadap perkembangan sosial dan pemerintahan daerah, termasuk transformasinya dari sebuah kerajaan kecil menjadi ibu kota provinsi yang modern dan berkembang pesat sebelum dihantam bencana.

Bagian berikutnya mengulas kelembagaan Pemerintah Kota Palu, khususnya peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu serta dinas-dinas terkait, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Bagian ini penting untuk memahami posisi strategis Pemerintah Kota Palu dalam merespons keadaan darurat, mengkoordinasikan evakuasi dan pertolongan korban, serta memulihkan tatanan kehidupan masyarakat yang porak-poranda. Pemerintah daerah bertindak sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan penanganan bencana yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sendiri.

4.1 Kondisi Geografis

Kota Palu, yang terletak dekat khatulistiwa, memiliki geografi unik berupa cekungan yang diapit pegunungan dan berhadapan dengan Teluk Palu, dengan

topografi datar hingga bergelombang (0-700 mdpl). Namun, lokasinya di atas Sesar Palu-Koro dan tanah aluvialnya yang lunak menjadikannya sangat rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Di sisi lain, lembahnya yang datar sangat subur untuk pertanian, didukung Sungai Palu dan pegunungan sekelilingnya, menjadikan Palu sebagai pusat aktivitas di Sulawesi Tengah. Batas Wilayah Utara: Kabupaten Donggala. Selatan Kabupaten Sigi. Barat: Kabupaten Donggala Timur: Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Gambar 3 : Letak Geografi kota palu



Sumber : Penelitian

Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peran krusial dimana jumlah penduduknya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Berdasarkan data, luas wilayah kota seluas 395,06 km² ditempati oleh populasi yang cukup padat. Meskipun data spesifik jumlah jiwa terus

mengalami perubahan, pola umum menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Palu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya seperti Donggala, mengingat statusnya sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan jasa. Seperti halnya di kabupaten tetangga, komposisi penduduknya pun seringkali ditandai dengan jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih banyak daripada perempuan. Data kependudukan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri selalu menjadi acuan untuk melihat tren aktual, termasuk mengidentifikasi adanya fenomena pertumbuhan yang tidak selalu linier, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti migrasi dan kebijakan pemekaran wilayah.

4.2 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palu

Kota Palu, sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan di wilayah tersebut. Secara administratif, pemerintahan Kota Palu dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk masa jabatan lima tahun. Mereka membawahi seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan publik. Struktur pemerintahannya terdiri atas Sekretariat Daerah (Sekda) yang membantu koordinasi, serta berbagai Dinas Daerah dan Badan yang menangani urusan teknis spesifik seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memegang peran kritis mengingat kerentanan wilayahnya terhadap bencana.

Sebagai sebuah wilayah otonom, Kota Palu memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang beranggotakan wakil rakyat terpilih. Fungsi utama DPRD Kota Palu adalah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda), melaksanakan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Palu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan arah pembangunan selama satu periode kepemimpinan, yang berfokus pada berbagai sektor seperti peningkatan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama adalah penanggulangan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Kota Palu terbagi ke dalam beberapa kecamatan dan kelurahan, yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan langsung kepada masyarakat. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sementara setiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Pembagian wilayah administratif ini memudahkan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mendistribusikan pelayanan serta program pembangunan secara lebih merata dan efektif. Tantangan terbesar pemerintah kota adalah mengelola pembangunan di tengah kondisi geografis yang kompleks dan rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip mitigasi bencana dan tata kelola kota yang tangguh harus diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan dan perencanaan tata ruang, menjadikan Palu sebagai contoh kota yang bangkit dan

beradaptasi dengan kondisi alamnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warganya.

4.3 Sejarah Kota Palu

4.3.1 Sejarah Sebelum Kemerdekaan

Secara historis, pemerintahan di wilayah yang kini menjadi Kota Palu pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan tradisional yang berdaulat. Wilayah cekungan Lembah Palu dan Teluk Palu pada awalnya berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Banawa di selatan dan Kerajaan Palu di utara, yang kemudian Kerajaan Palu menjadi yang paling dominan. Struktur pemerintahan kala itu dipimpin oleh seorang Raja (Magau) yang dibantu oleh para pembesar kerajaan seperti Joguru (penasehat raja), Gela (kepala adat), dan Pabicara (juru bicara atau pelaksana perintah raja). Masyarakat hidup dalam sistem kesukuan yang disebut Kayanta, di mana setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku. Kekuasaan kolonial Belanda mulai masuk dan menancapkan pengaruhnya sekitar abad ke-19, mengubah tata pemerintahan tradisional dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*Indirect Rule*). Belanda mengakui keberadaan Kerajaan Palu namun menjadikannya bagian dari wilayah administrasi Hindia Belanda yang disebut Afdeling Donggala dengan pusat pemerintahan di Donggala, sementara Palu berstatus sebagai Onderafdeling Palu yang dikendalikan oleh seorang Controleur Belanda. Pada era ini, Raja tetap berkuasa tetapi wewenangnya dibatasi dan harus tunduk pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

4.3.2 Sejarah Setelah Kemerdekaan

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, sistem pemerintahan kerajaan tradisional secara bertahap diintegrasikan ke dalam struktur Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah *Onderafdeling* Palu berubah status menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dengan ibukota pertama kali di Donggala. Kota Palu yang strategis dan berkembang pesat kemudian ditetapkan sebagai ibukota kabupaten ini, menandai perpindahan pusat pemerintahan dari pesisir ke lembah. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, Palu kemudian ditingkatkan statusnya dari ibukota kabupaten menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1978. Akhirnya, setelah melalui proses panjang, Kota Palu secara resmi ditetapkan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II (sekarang disebut Pemerintah Kota) berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1994, yang menandai pemisahan wilayah administrasi pemerintahan secara definitif dari Kabupaten Donggala.

Sebagai sebuah daerah otonom, Pemerintahan Kota Palu modern dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Wali Kota membentuk perangkat daerah untuk membantu pelaksanaan tugasnya, yang terdiri atas Sekretariat Daerah (Sekda), Dinas-Dinas, dan Badan-Badan. Di samping itu, terdapat lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara administratif, wilayah Kota

Palu terbagi ke dalam 8 kecamatan dan 46 kelurahan, yang mencerminkan perluasan wilayah dari sebelumnya hanya 4 kecamatan. Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tidak hanya menjalankan pemerintahan otonom kotanya sendiri, tetapi juga menjadi pusat dari seluruh aktivitas pemerintahan tingkat provinsi, menjadikannya jantung politik, birokrasi, dan pelayanan publik bagi wilayah Sulawesi Tengah. Warisan sejarah panjang dari era kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan telah membentuk tata kelola pemerintahan Kota Palu yang modern namun tetap kaya akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

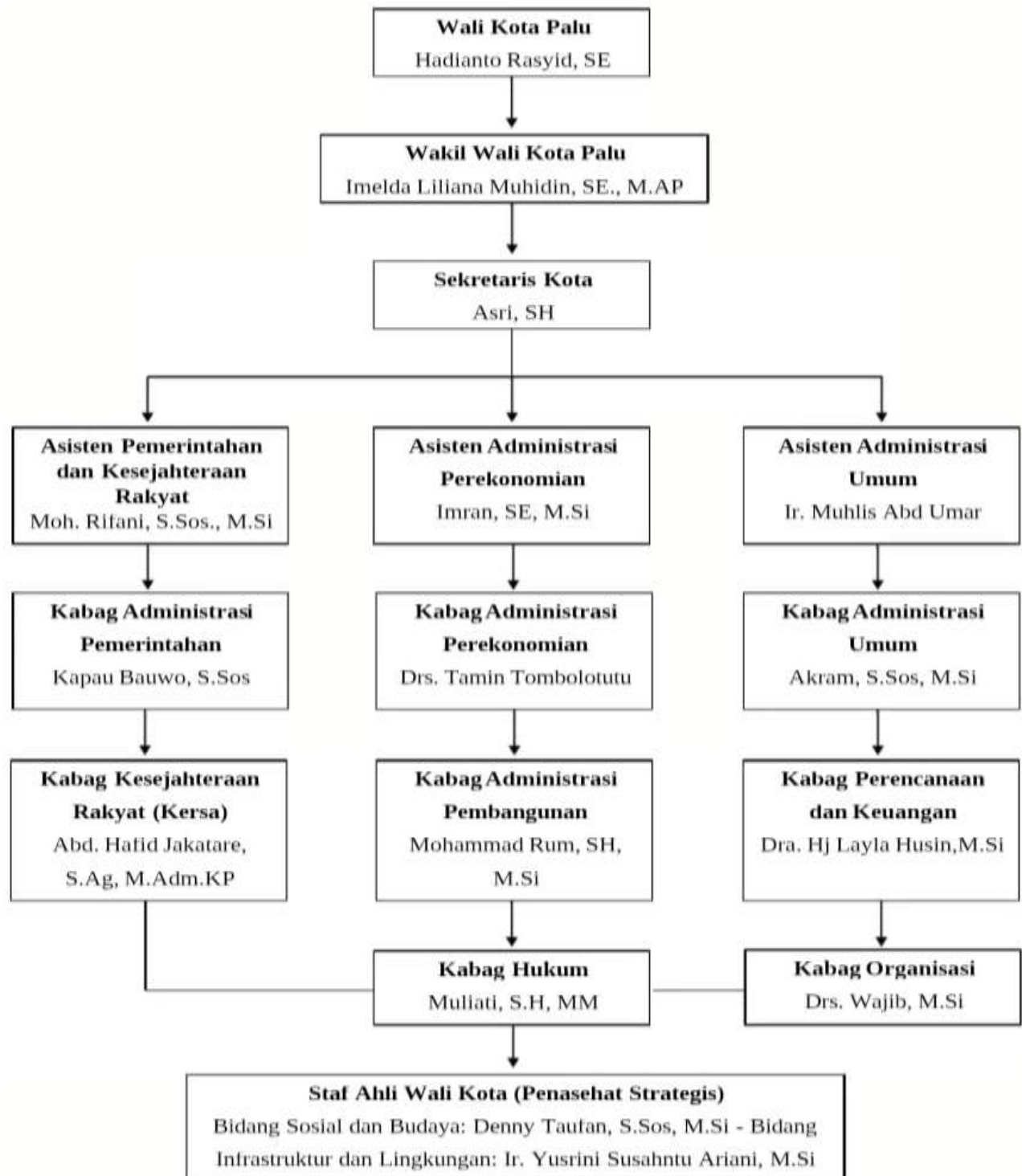
4.4 Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Palu

Struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Kota Palu dibangun berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan kepala daerah eksekutif, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah, yang secara struktural terdiri atas Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas, serta Badan-Badan dan Kecamatan. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggi dan berperan sebagai koordinator seluruh perangkat daerah serta penanggung jawab administratif. Di sisi legislatif, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk memastikan tata kelola yang bersih dan akuntabel, Kota Palu juga memiliki

instansi vertikal seperti Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan internal, serta Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat wilayah yang melayani masyarakat langsung di tingkat grassroots. Tata kelola pemerintahan Kota Palu terus berkembang mengintegrasikan prinsip smart city dan e-government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik bagi warganya.

Wali Kota selaku pemimpin eksekutif bertindak sebagai *commander in chief* yang mengeluarkan kebijakan strategis dan mengkoordinasikan semua sumber daya, sementara Sekretaris Daerah (Sekda) memastikan seluruh dinas seperti Dinas Sosial, PUPR, dan Kesehatan, serta badan seperti BPBD, bergerak secara terintegrasi dan sesuai dengan prosedur. DPRD Kota Palu menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan ketat untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran, sedangkan Inspektorat memperkuat pengawasan internal guna mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan dan proyek pemulihan. Integrasi prinsip *smart city* dan *e-government* dimanfaatkan untuk menciptakan sistem database korban dan bantuan yang transparan, mempercepat perencanaan tata ruang baru pascalikuifaksi, serta memulihkan pelayanan publik secara digital agar lebih efisien dan akuntabel di tengah kondisi darurat.

Gamabr 4 : Struktur Organisasi Kota Palu



Sumber : Penelitian

Susunan jabatan dan unit kerja di bawah kepemimpinan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Wali Kota Palu, Hadiano Rasyid, SE, yang dibantu oleh Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.AP. Keduanya merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas seluruh jalannya pemerintahan di Kota Palu.

Di bawah mereka, terdapat Sekretaris Kota, yaitu Asri, SH, yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan mendukung kinerja kepala daerah melalui koordinasi tiga asisten. Ketiga asisten tersebut terdiri dari: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dijabat oleh Moh. Rifani, S.Sos, M.Si; Asisten Administrasi Perekonomian, dijabat oleh Imran, SE, M.Si; dan Asisten Administrasi Umum, dijabat oleh Ir. Muhlis Abd Umar. Masing-masing asisten memiliki tugas pokok dalam lingkup kerja tertentu, mulai dari urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan ekonomi dan administrasi umum. Selain itu, terdapat pula Staf Ahli Wali Kota yang bertugas memberikan masukan strategis dan kajian kebijakan. Beberapa di antaranya adalah Denny Taufan, S.Sos, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya, serta Ir. Yusrini Susahntu Ariani, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan. Posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan belum disebutkan dalam data yang tersedia. Struktur organisasi ini juga mencakup berbagai Kepala Bagian (Kabag) yang berada di bawah koordinasi para asisten dan sekretaris kota. Beberapa jabatan penting di antaranya adalah Kabag Administrasi Pembangunan (Mohammad Rum, SH, M.Si), Kabag Hukum (Muliati, SH, MM),

Kabag Organisasi (Drs. Wajib, M.Si), Kabag Administrasi Perekonomian(Drs. Tamin Tombolotutu), Kabag Administrasi Umum (Akram, S.Sos, M.Si), KabagPerencanaan dan Keuangan (Dra. Hj Layla Husin, M.Si), Kabag Administrasi Pemerintahan

4.5 Gambaran Umum Bencana 28 September 2018 di kota Palu

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, dilanda serangkaian bencana besar yang beruntun dan menghancurkan pada tanggal 28 September 2018. Bencana ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 7,4 Magnitudo yang episentrumnya terletak di laut, sekitar 80 kilometer utara Kota Palu. Guncangan gempa yang kuat dan berdurasi lama tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan infrastruktur di kota itu sendiri, tetapi juga memicu dua dampak lanjutan yang jauh lebih mematikan: tsunami dan likuefaksi (pencairan tanah). Dalam hitungan menit setelah gempa, gelombang tsunami setinggi hingga 6 meter menerjang pantai Teluk Palu, menyapu kawasan permukiman, bisnis, dan tempat wisata di sepanjang pesisir. Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Kelurahan Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, fenomena likuefaksi yang langka dan mengerikan terjadi, di mana tanah yang jenuh air berubah menjadi cairan dan menelan seluruh permukiman beserta isinya. Kombinasi mematikan dari gempa kuat, tsunami, dan likuefaksi ini menjadikan peristiwa 28 September 2018 sebagai salah satu bencana multidimensi paling kompleks dan tragis yang pernah melanda Indonesia, mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar serta kehancuran infrastruktur yang masif.

4.6 Kronologi dan Dampak Bencana (Gempa, Tsunami, Likuifaksi)

Gempa Bumi merupakan peristiwa yang menjadi pemicu utama dalam serangkaian bencana ini. Kronologinya dimulai dari pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi akibat pergeseran lempeng tektonik, yang kemudian menghasilkan getaran hebat yang mengguncang wilayah di atasnya. Getaran ini dicatat oleh seismograf dan diukur besarnya menggunakan skala Richter atau Moment Magnitude (Mw). Dampak langsung dari gempa bumi ini sangat luas dan menghancurkan, mulai dari kerusakan bangunan, infrastruktur, jalan raya, dan jembatan yang ambruk, hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka akibat reruntuhan. Guncangan yang kuat juga memicu kepanikan massal dan memutuskan aliran listrik serta komunikasi, menyulitkan upaya pertolongan pertama.

Tsunami adalah dampak lanjutan yang sering menyusul setelah gempa bumi berkekuatan besar dengan episentrum yang terletak di bawah laut. Kronologi terjadinya dimulai ketika deformasi dasar laut secara vertikal akibat gempa mendorong volume air dalam jumlah masif, menciptakan gelombang yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju daratan. Saat mendekati pantai, gelombang ini melambat tetapi tumbuh secara vertikal menjadi wall of water (dinding air) yang sangat dahsyat. Dampak dari tsunami ini seringkali lebih mematikan daripada gempanya sendiri, menyapu bersih seluruh kawasan pesisir, menghancurkan permukiman, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar akibat tenggelam dan terbentur reruntuhan.

Likuifaksi (pencairan tanah) adalah fenomena geoteknik unik yang dipicu oleh guncangan gempa kuat pada tanah tertentu. Kronologi kejadiannya berawal ketika getaran gempa mengoyakkan ikatan partikel pada tanah jenuh air (seperti pasir lepas dan lanau), menyebabkan tekanan air pori meningkat drastis hingga tanah kehilangan kekuatan dan kekakuannya, berperilaku seperti cairan kental. Dampak dari likuifaksi ini sangat spektakuler dan merusak; tanah yang semula padat tiba-tiba berubah menjadi lumpur hisap yang menelan apa saja di atasnya. Akibatnya, bangunan-bangunan dapat amblas, miring, atau bahkan hanyut, pipa dan jaringan bawah tanah terputus, dan permukaan tanah retak-retak serta berubah bentuk secara permanen, mengubah lanskap suatu wilayah secara drastis.

a. Waktu dan besaran (magnitudo) gempa bumi di kota palu

Gempa bumi di kota Palu pada tahun 2018 terjadi pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA dengan besaran magnitudo sekitar 7,4 hingga 7,5 Skala Magnitudo Momen (M_w). Pusat gempa berada sekitar 26 km utara Donggala dan sekitar 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman sekitar 10-20 km. Guncangan ini dirasakan sangat kuat di Kota Palu dan sekitarnya. Gempa ini juga memicu tsunami dengan gelombang setinggi antara 4 hingga 7 meter di wilayah Pantai Kota Palu, dengan tsunami tertinggi tercatat mencapai 11,3 meter di Desa Tondo, Palu Timur. Jadi, waktu gempa adalah pukul 18.02 WITA pada 28 September 2018, dan magnitudo gempa berkisar antara 7,4 sampai 7,7 M_w , dengan pusat gempa di dekat Donggala dan Palu

b. Tinggi dan jangkauan gelombang tsunami

Tinggi gelombang tsunami merujuk pada perbedaan vertikal antara puncak gelombang (crest) dan lembahnya (trough). Namun, penting untuk membedakan antara tinggi gelombang di laut lepas dan saat mencapai daratan. Di tengah samudera yang dalam, tsunami memiliki tinggi gelombang yang sangat rendah, seringkali hanya sekitar 30 cm hingga 1 meter, sehingga hampir tidak terasa oleh kapal yang melintas di atasnya. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, setara dengan pesawat jet (500-800 km/jam), dengan panjang gelombang yang bisa mencapai ratusan kilometer. Energi yang dibawanya tidak terletak pada ketinggiannya, tetapi pada volume air yang sangat besar yang digerakkan.

1. Rendah di Laut Dalam Tinggi gelombang di laut lepas biasanya di bawah 1 meter.
2. Panjang Gelombang Besar Jarak antara dua puncak gelombang bisa mencapai 100 km atau lebih.
3. Energi Tersembunyi Energi tsunami tersimpan dalam volume air, bukan pada ketinggiannya saat di laut lepas.

Ketika tsunami bergerak mendekati garis pantai, dasar laut yang semakin dangkal menyebabkan gelombang mengalami proses yang disebut "shoaling". Air yang bergerak cepat di laut dalam diperlambat secara dramatis oleh gesekan dengan dasar laut, namun energi yang dibawanya tetap sama. Akibatnya, energi yang terkumpul itu dipaksa untuk bergerak ke atas, secara signifikan meningkatkan **tinggi** gelombang. Gelombang yang awalnya hanya setinggi kurang dari satu meter dapat berubah menjadi dinding air raksasa setinggi 10, 20,

bahkan 30 meter sebelum akhirnya menghantam daratan. Ketinggian akhir ini sangat dipengaruhi oleh topografi dan batimetri (bentuk dasar laut) di wilayah pesisir.

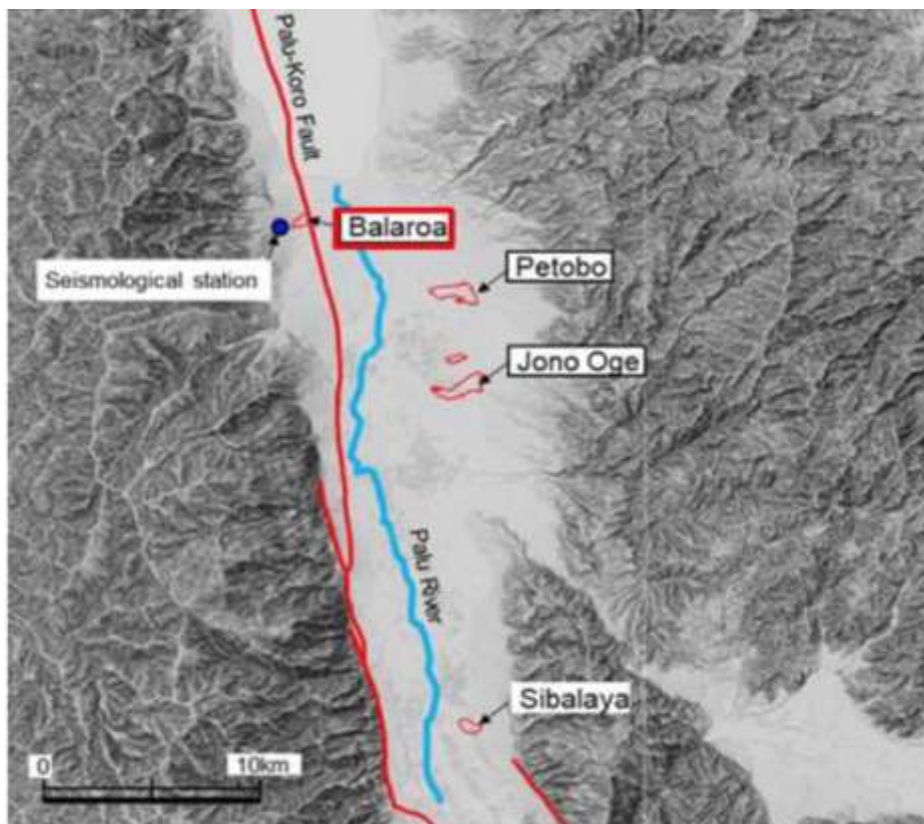
- c. Lokasi-lokasi yang terdampak likuifaksi secara paling parah (e.g., Kelurahan Petobo, Balaroa, Jono Oge)

Kelurahan Petobo merupakan simbol dari kehancuran dahsyat akibat fenomena likuifaksi. Kawasan seluas ratusan hektar ini tidak hanya amblas, tetapi mengalami pergeseran tanah (land displacement) secara massal sejauh ratusan meter. Ribuan rumah hancur, terpelintir, dan tertimbun oleh lumpur yang menyembur dari dalam bumi. Yang tersisa hanyalah landscape berupa gundukan-gundukan tanah, puing-puing, dan danau-danau lumpur yang mengering, menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan yang melelehkan tanah dasar permukiman padat penduduk tersebut.

Nasib serupa menimpa Kelurahan Balaroa, di mana permukiman yang dibangun di atas tanah bekas galian tambang longsor dan amblas secara tragis. Dampak terparah terjadi pada kompleks Perumahan BTN Balaroa, dimana ratusan rumah tenggelam dan hancur berantakan ditelan bumi. Likuifaksi di Balaroa juga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, karena terjadi dengan sangat cepat dan tidak memberikan kesempatan bagi warga untuk menyelamatkan diri. Kawasan ini menjadi saksi bisu bagaimana guncangan gempa mengubah tanah yang tampak padat menjadi cairan yang menghancurkan segala yang di atasnya.

Di Kabupaten Sigi, Desa Jono Oge juga mengalami kehancuran masif akibat likuifaksi. Proses yang terjadi di sini didominasi oleh amblasnya tanah dan munculnya retakan-retakan besar (fissures) yang menyemburkan pasir dan air. Retakan-retakan ini menghancurkan fondasi rumah, jalan, serta jaringan irigasi, mengubah lahan pertanian dan permukiman menjadi lapangan yang tidak rata dan dipenuhi material sisa erupsi. Dampaknya meluas hingga ke sektor perekonomian warga, yang mayoritas petani, karena lahan produktif mereka hancur dan tertutup lumpur, meninggalkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang pulihnya membutuhkan waktu sangat lama.

Gambar 5 : Gambar Lokasi Likuifaksi



Sumber : Peneliti

Kejadian bencana tergolong sangat unik. Mekanisme bencana dikategorikan aliran tanah; aliran longsor jarak jauh terjadi di lereng yang sangat landai sekitar 1,0-5,0 % (Kiyota et al., 2020). Arah aliran tanah ditunjukkan oleh Gambar 1.2. Arah aliran gerakan tanah di Petobo relatif Timur-Barat. Arah aliran Gerakan tanah di Jono Oge relatif Timur Laut - Barat Daya lalu berbelok arah menjadi relatif Timur - Barat. Karakteristik bencana di area penelitian kemiringan lereng rendah, aliran jarak jauh, serta meliputi area yang luas (Miyajima et al., 2019). Arah aliran gerakan tanah di Balaroa relatif Barat Daya - Timur Laut. Rata-rata kemiringan lereng dan luasan area aliran tanah

d. Data korban jiwa, luka-luka, dan pengungsi

Data korban dalam suatu bencana atau konflik umumnya dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak kemanusiaannya. Data korban jiwa (fatality) merujuk pada jumlah orang yang meninggal dunia, yang menjadi indikator paling tragis dari tingkat keparahan suatu peristiwa. Data korban luka-luka mencakup individu yang mengalami cedera fisik, mulai dari luka ringan hingga berat, yang membutuhkan penanganan medis. Sementara itu, data pengungsi (refugee atau internally displaced person/IDP) mewakili jumlah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan dan keamanan, baik di dalam negeri maupun melintasi perbatasan. Ketiga data ini menjadi fondasi kritikal bagi pemerintah, lembaga bantuan, dan organisasi internasional dalam menilai skala bencana, merencanakan respons darurat, dan menyalurkan bantuan yang tepat sasaran.

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Kondisi Bangunan Akibat Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi Di Kota Palu Tahun 2018 Tahap I

N o	KECAMATAN	KELURAHAN	KONDISI BANGUNAN				JUMLAH	STATUS LAHAN		AKIBAT KERUSAKAN				KET
			RB	RS	RR	HL		HM	SW	GBS	GB	TS	LK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	MANTIKULORE	1. TANAMODINDI	337	881	668	0	1886	1885	1	0	1886	0	0	
		2. TONDO	641	558	365	152	1716	1714	2	1208	472	36	0	
		3. KAWATUNA	479	334	276	0	1089	1089	0	0	1089	0	0	
		4. TALISE VALANGGUNI	190	785	413	0	1388	1388	0	0	1388	0	0	
		5. LASOANI	16	109	290	0	415	407	8	0	415	0	0	
		6. LAYANA INDAH	48	183	337	127	695	695	0	0	563	132	0	
		7. TALISE	205	283	919	156	1563	1563	0	0	1323	233	7	
		8. POBOYA	43	129	93	0	265	265	0	0	265	0	0	
		JUMLAH	1959	3262	3361	435	9017	9006	11	1208	7401	401	7	
II	PALU SELATAN	1. BIROBULI UTARA	105	490	408	0	1003	1003	0	0	1003	0	0	
		2. BIROBULI SELATAN	90	236	1805	0	2131	1677	454	0	2131	0	0	
		3. TATURA SELATAN	15	191	136	0	342	342	0	0	342	0	0	
		4. TATURA UTARA	52	349	922	0	1323	1323	0	0	1323	0	0	
		5. PETOBO	1203	376	211	1230	3020	3020	0	0	587	0	2433	
		JUMLAH	1465	1642	3482	1230	7819	7365	454	0	5386	0	2433	
III	TATANGA	1. DUYU	551	377	437	0	1365	1365	0	9	1356	0	0	
		2. NUNU	17	5	148	0	170	170	0	0	170	0	0	
		3. PALUPI	391	745	900	0	2036	2012	24	212	1824	0	0	
		4. TAVANJUKA	81	109	498	0	688	672	16	0	688	0	0	
		5. BAYAOGE	101	444	414	0	959	959	0	0	959	0	0	
		6. PENGAWU	454	524	635	0	1613	1590	23	229	1384	0	0	
		JUMLAH	1595	2204	3032	0	6831	6768	63	450	6381	0	0	

IV	TAWAELI	1. PANTOLOAN 2. PANTOLOAN BOYA 3. LAMBARA 4. BAIYA	125 74 150 41	199 117 274 66	355 381 328 373	176 32 0 0	855 604 752 480	852 596 722 480	3 8 30 0	0 0 0 0	654 566 752 480	201 38 0 0	0 0 0 0	
		5. PANAU	220	307	316	196	1039	1038	1	0	658	381	0	
	JUMLAH		610	963	1753	404	3730	3688	42	0	3110	620	0	
V	PALU TIMUR	1. BESUSU TIMUR 2. BESUSU TENGAH 3. BESUSU BARAT 4. LOLU UTARA 5. LOLU SELATAN	276 173 117 267 421	479 170 34 296 468	370 284 127 438 386	0 0 103 0 0	1125 627 381 1001 1275	1125 627 333 1001 1275	0 0 48 0 0	1 0 0 0 0	1124 627 381 1001 1275	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	JUMLAH		1254	1447	1605	103	4409	4361	48	1	4408	0	0	
VI	PALU UTARA	1. MAMBORO INDUK 2. MAMBORO BARAT	47 25	198 50	45 84	82 155	372 314	372 246	0 68	0 0	276 157	96 157	0 0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. TAIPA 4. KAYUMALUE NGAPA 5. KAYUMALUE PAJEKO	70 30 74	84 24 61	206 325 164	1 0 0	361 379 299	361 379 299	0 0 0	0 0 0	361 379 266	0 0 33	0 0 0	
	JUMLAH	246	417	824	238	1725	1657	68	0	1439	286	0		
VII	PALU BARAT	1. BARU 2. UJUNA 3. SIRANINDI 4. BALAROA 5. KAMONJI 6. LERE	47 21 3 652 346 164	159 48 22 199 1 676	160 306 14 96 0 573	0 0 0 772 0 262	366 375 39 1719 347 1675	353 358 39 1719 347 1675	13 17 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	366 375 39 175 347 1389	0 0 0 0 0 286	0 0 0 1544 0 0	
	JUMLAH	1233	1105	1149	1034	4521	4491	30	0	2691	286	1544		

VIII	ULUJADI	1. BULURI	52	53	260	117	482	482	0	0	315	167	0	
		2. DONGGALA KODI	260	494	388	0	1142	1138	4	0	1140	0	2	
		3. KABONENA	145	381	392	0	918	918	0	0	918	0	0	
		4. SILAE	214	413	752	36	1415	1415	0	0	1314	101	0	
		5. TIPO	104	299	178	45	626	625	1	0	541	85	0	
		6. WATUSAMPU	44	37	117	31	229	229	0	0	198	31	0	
	JUMLAH	819	1677	2087	229	4812	4807	5	0	4426	384	2		
	TOTAL	9181	12717	17293	3673	42864	42143	721	1659	35242	1977	3986		

ket:													
RB	: Rusak Berat	GBS	: Gempa Bumi Sesar	WALI KOTA PALU,									
RS	: Rusak Sedang	GB	: Gempa Bumi										
RR	: Rusak Ringan	TS	: Tsunami										
HL	: Hilang	LK	: Likuifaksi										
HM	: Hak Milik												
SW	: Sewa			HIDAYAT									

Sumber : Kantor DPBD Kota Palu

Rekapitulasi data kondisi bangunan akibat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu tahun 2018 tahap, terlihat bahwa bencana yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 menyebabkan dampak kerusakan yang sangat signifikan pada bangunan di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan, tercatat 42.864 bangunan terdampak, dengan rincian 9.181 bangunan rusak berat (RB), 12.717 rusak sedang (RS), 17.293 rusak ringan (RR), dan 3.673 bangunan hilang (HL). Data tersebut terdistribusi di delapan kecamatan, dengan tingkat kerusakan dan penyebab yang bervariasi antar wilayah.

Beberapa kecamatan seperti Palu Selatan dan Palu Barat mengalami dampak likuifaksi (LK) yang sangat besar, masing-masing dengan 2.433 dan 1.544 bangunan terdampak. Sementara itu, tsunami (TS) juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kecamatan Tawaeli (620 bangunan) dan Palu Utara (286 bangunan). Sebagian besar kerusakan bangunan disebabkan oleh gempa bumi (GB), yang mencapai 35.242 kejadian, disusul oleh likuifaksi (3.986), tsunami (1.977), dan gempa bumi sesar (GBS) sebanyak 1.659 kejadian. Status kepemilikan lahan didominasi oleh hak milik (HM) sebanyak 42.143, sedangkan yang berstatus sewa (SW) hanya 721.

Dari segi distribusi kerusakan per kelurahan, wilayah seperti Tatura Utara (Palu Selatan), Balaroa (Palu Barat), dan Layana Indah (Mantikulore) termasuk yang paling parah terdampak, baik akibat gempa, tsunami, maupun likuifaksi. Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang besarnya dampak bencana terhadap infrastruktur permukiman di Kota Palu serta perlunya penanganan serius untuk pemulihan dan rekonstruksi.

Selain kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk melengkapi analisis dampak bencana secara keseluruhan, diperlukan juga data mengenai jumlah kematian pasca bencana yang terperinci per kecamatan dan kelurahan. Informasi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang tingkat keparahan bencana serta membantu dalam perencanaan penanggulangan dampak kemanusiaan di masa mendatang.

Korban jiwa terdalam tidak hanya tersebar secara geografis, tetapi juga menunjukkan variasi dalam penyebab utama kematian di setiap wilayah. Sebagai contoh, di Kelurahan Petobo (Palu Selatan), likuifaksi menjadi penyebab utama dengan 464 korban jiwa, sementara di Kelurahan Balaroa (Palu Barat), fenomena yang sama menelan korban hingga 732 jiwa. Sebaliknya, wilayah pesisir seperti Besusu Barat (Palu Timur) justru mengalami korban terbanyak akibat tsunami, yaitu 192 jiwa.. pendataan yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai memorial atas korban jiwa, tetapi juga menjadi peta jalan yang kritis untuk kebijakan penanggulangan bencana. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana evakuasi yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik wilayah, dan merancang infrastruktur yang lebih tahan terhadap ancaman tertentu seperti likuifaksi atau tsunami. Dengan belajar dari pola distribusi korban ini, pemerintah dan masyarakat dapat membangun ketahanan yang lebih baik, meminimalkan korban jiwa, dan memastikan bahwa pemulihan pascabencana benar-benar membangun kembali dengan prinsip yang lebih aman dan berkelanjutan.

Tabel 2 : rekapitulasi data korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahun 2018 tahap 1

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KORBAN JIWA	KORBAN		JUMLAH TEMPAT KEJADIAN PERISTIWA			KORBAN YANG DIKUBURKAN MASAL	KET
				MD	HL	GB	TS	LK		
1		2		5	6	10	11	12		15
I	MANTIKULORE	1. TANAMODINDI	18	10	8	6	12	0		
		2. TONDO	33	27	6	3	30	0		
		3. KAWATUNA	9	9	0	3	6	0		
		4. TALISE VALANGGUNI	16	5	11	3	13	0		
		5. LASOANI	17	15	2	7	9	1		
		6. LAYANA INDAH	67	53	14	0	67	0		
		7. TALISE	153	131	22	3	150	0		
		8. POBOYA	6	5	1	5	1	0		
	JUMLAH		319	255	64	30	288	1		
II	PALU SELATAN	1. BIROBULI UTARA	29	15	14	8	17	4		
		2. BIROBULI SELATAN	28	20	8	6	12	10		
		3. TATURA SELATAN	26	19	7	3	20	3		
		4. TATURA UTARA	34	30	4	9	20	5		
		5. PETOBO	464	343	121	0	0	464		
	JUMLAH		581	427	154	26	69	486		
III	TATANGA	1. DUYU	22	17	5	10	12	0		
		2. NUNU	18	6	12	2	14	2		
		3. PALUPI	26	8	18	2	19	5		
		4. TAVANJUKA	8	6	2	2	6	0		
		5. BAYAOGE	15	10	5	3	12	0		
		6. PENGAWU	21	18	3	6	14	1		
	JUMLAH		110	65	45	25	77	8		
IV	TAWAELI	1. PANTOLOAN	93	93	0	1	92	0		
		2. PANTOLOAN BOYA	7	3	4	0	7	0		
		3. LAMBARA	3	2	1	2	1	0		
		4. BAIYA	7	6	1	0	7	0		
		5. MPANAU	45	45	0	2	43	0		
	JUMLAH		155	149	6	5	150	0		

V	PALU TIMUR	1. BESUSU BARAT	192	191	1	0	192	0		
		2. BESUSU TENGAH	33	33	0	4	29	0		
		3. BESUSU TIMUR	22	18	4	0	20	2		
		4. LOLU UTARA	30	19	11	3	18	9		
		5. LOLU SELATAN	29	18	11	5	19	5		
	JUMLAH		306	279	27	12	278	16		
VI	PALU UTARA	MAMBORO BARAT	26	21	5	3	21	2		
		MAMBORO INDUK	25	24	1	1	24	0		
		KAYUMALUE NGAPA	3	1	2	0	3	0		
		TAIPA	6	4	2	4	2	0		
		KAYUMALUE PAJEKO	9	4	5	1	8	0		
	JUMLAH		69	54	15	9	58	2		
		1. BALAROA	738	602	136	2	4	732		
VII	PALU BARAT	2. KAMONJI	31	30	1	0	27	4		
		3. BARU	15	9	6	3	12	0		
		4. SIRANINDI	12	12	0	1	11	0		
		5. UJUNA	53	44	9	8	45	0		
		6. LERE	94	83	11	14	79	1		
	JUMLAH		943	780	163	28	178	737		
VIII	ULUJADI	1. BULURI	30	25	5	0	28	2		
		2. DONGGALA KODI	54	40	14	22	32	0		
		3. KABONENA	26	17	9	17	9	0		
		4. SILAE	40	25	15	25	15	0		
		5. WATUSAMPU	21	7	14	7	14	0		
	6. TIPO	9	8	1	1	8	0			
JUMLAH		180	122	58	72	106	2			
	TOTAL		2663	2131	532	207	1204	1252	1016	981 TPU POBOYA 35 PANTOLOAN BOYA
				3679	Jumlah korban meninggal dunia + korban hilang + korban dikuburkan massal					

Sumber : Kantor DPBD Kota Palu

Berdasarkan data rekapitulasi korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 Tahap I, tercatat total korban jiwa sebanyak 2.663 orang, dengan rincian 2.131 orang meninggal dunia dan 532 orang dinyatakan hilang. Korban tersebar di delapan kecamatan di Palu, dengan kecamatan yang paling terdampak adalah Palu Barat (943 korban), Palu Selatan (581 korban), dan Palu Timur (306 korban). Sebagian besar korban disebabkan oleh tsunami (1.204 kejadian) dan likuifaksi (1.252 kejadian), sementara gempa bumi sendiri menyebabkan 207 kejadian. Sebanyak 1.016 korban dikuburkan secara massal, dengan lokasi penguburan terbanyak di TPU Poboya (981 orang) dan Pantoloan Boya (35 orang). Total korban yang tercatat (meninggal, hilang, dan dikubur massal) mencapai 3.679 jiwa. Data ini menunjukkan betapa signifikannya dampak bencana tersebut, terutama akibat fenomena likuifaksi dan tsunami yang menyusul setelah guncangan gempa.

4.7 Tantangan Dalam Implementasi Peran BPBD Kota Palu

Di samping tantangan utama yang telah dijelaskan, terdapat pula kendala lain yang bersifat lebih kompleks dan sistemik. Tantangan tersebut adalah integrasi data dan sistem peringatan dini yang belum optimal. Data risiko bencana yang terfragmentasi di berbagai instansi serta teknologi sistem peringatan dini yang masih terbatas untuk memprediksi kejadian multi-bencana secara real-time membuat proses evakuasi dan mitigasi seringkali terlambat. Selain itu, faktor psikologis dan trauma kolektif masyarakat pasca bencana 2018 menjadi penghambat tersendiri. Rasa trauma yang mendalam dapat memicu penolakan atau kepanikan massal yang justru menyulitkan proses evakuasi dan sosialisasi

kebijakan mitigasi bencana yang baru. Tantangan koordinasi dengan sektor privat dan pemangku kepentingan non-pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Koordinasi tidak hanya diperlukan pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam fase pembangunan kembali dan tata ruang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Seringkali, interest bisnis dan pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Terakhir, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan pasca-bencana juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.

1. implementasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang saling berkait. Pertama, tantangan geografis dan geologis yang unik dan berisiko tinggi. Palu berada di zona seismik aktif dengan struktur palung dan patahan yang memicu multi-bencana (gempa, tsunami, dan likuifaksi) secara hampir bersamaan. Hal ini membuat sistem peringatan dini konvensional, khususnya untuk tsunami, menjadi kurang efektif karena waktu evakuasi yang sangat singkat.
2. keterbatasan infrastruktur dan logistik. Pasca-bencana 2018 pembangunan kembali terus berjalan, namun infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi, shelter permanen, dan sistem komunikasi yang tahan bencana masih perlu ditingkatkan kapasitas dan penyebarannya untuk mengcover seluruh wilayah rentan.
3. tantangan sumber daya manusia dan kesiapsiagaan masyarakat Meski kesadaran masyarakat telah meningkat, tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi

aktif dalam simulasi masih perlu ditingkatkan secara konsisten. Di sisi lain, kapasitas SDM di tubuh BPBD sendiri, baik dari segi jumlah maupun keahlian teknis penanggulangan bencana multi-jenis, terus diuji.

4. aspek koordinasi dan kelembagaan Koordinasi yang solid antar instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan relawan pada saat tanggap darurat adalah kunci. Tantangannya adalah memastikan mekanisme komando yang terintegrasi dan menghindari tumpang tindih wewenang agar respons menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
5. tantangan pendanaan dan keberlanjutan BPBD tidak hanya membutuhkan anggaran untuk operasional tanggap darurat, tetapi juga untuk program mitigasi, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi jangka panjang yang berkelanjutan. Memastikan alokasi dan penyerapan anggaran yang memadai dan tepat guna merupakan tantangan birokratis yang nyata. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun BPBD Kota Palu telah menunjukkan komitmennya, diperlukan upaya kolektif yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat pemerintah pusat hingga warga masyarakat, untuk membangun sistem ketangguhan bencana yang benar-benar efektif di Kota Palu.

4.8 Upaya Optimalisasi Peran BPBD Kota Palu Dalam masa Pemulihan

Pascabencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mengalami transisi kritis dari fase tanggap darurat menuju fase pemulihan yang berkelanjutan, di mana optimalisasi perannya menjadi penentu utama keberhasilan membangun kembali masyarakat yang lebih tangguh.

Optimalisasi ini berarti mentransformasi peran BPBD dari sekadar institusi reaktif penanggulangan dampak bencana menjadi aktor proaktif dan koordinator yang mengintegrasikan seluruh sektor pemulihan, mulai dari rekonstruksi infrastruktur, rehabilitasi sosial-ekonomi, hingga pemulihan psikologis korban. Fase pemulihan menuntut BPBD Kota Palu untuk tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga membangun sistem peringatan dini, mempromosikan pengurangan risiko bencana (PRB) melalui edukasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor privat untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan transparan, inklusif, dan berbasis pada prinsip *build back better*. Dengan demikian, upaya optimalisasi ini pada hakikatnya adalah upaya sistematis untuk mengembalikan denyut kehidupan Kota Palu yang tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih siap dan adaptif dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

BPBD Kota Palu perlu segera merumuskan peta jalan pemulihan jangka menengah dan panjang yang terukur dan realistis. Langkah strategis pertama adalah melakukan asesmen menyeluruh untuk memetakan kembali kebutuhan yang bersifat mendesak dan berkelanjutan, memastikan tidak ada satupun korban atau sektor yang tertinggal (*leaving no one behind*). Selanjutnya, membentuk *command center* pemulihan yang berfungsi sebagai penghubung dan sinkronisasi antara program rehabilitasi fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum, pemulihan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta dukungan psikososial oleh Dinas Sosial dan organisasi profesional. Melalui koordinasi terpusat ini, setiap sumber daya dapat dialokasikan secara efisien, menghindari tumpang tindih program, dan

memastikan seluruh upaya pemulihan berjalan terintegrasi menuju satu tujuan: ketangguhan Kota Palu.

4.9 Tugas Dan Wewenang BPBD Kota Palu

Berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Palu memiliki tugas dan wewenang yang komprehensif yang menjadi landasan bagi segala upaya optimalisasinya, termasuk dalam masa pemulihan. Secara umum, tugas utama BPBD Kota Palu adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya yang meliputi seluruh spektrum manajemen bencana: pra-bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), saat tanggap darurat, dan pasca-bencana (pemulihan). Secara lebih spesifik, dalam konteks pemulihan, tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan permukiman, serta pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

Sementara wewenangnya mencakup pengkoordinasian secara efektif semua pihak yang terlibat (instansi pemerintah, LSM, relawan, dan sektor swasta), penggunaan sumber daya yang ada, penetapan lokasi dan status darurat bencana (yang menjadi dasar alokasi sumber daya), dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk memastikan seluruh proses, termasuk rekonstruksi, berjalan sesuai prinsip transparansi dan *build back better*. Dengan demikian, tugas dan wewenang ini memberikan mandat yang kuat bagi

BPBD Kota Palu untuk memimpin, mengatur, dan mengawal seluruh proses pemulihan menuju Kota Palu yang lebih tangguh.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan peran sentral dan fundamental. Sebagai regulator, pemerintah berwenang menetapkan dan menegakkan seluruh kerangka hukum, kebijakan, standar operasional, dan prosedur (SOP) yang mengatur setiap aspek penanggulangan bencana. Peran ini mencakup pembuatan peraturan darurat, alokasi sumber daya, pengawasan distribusi bantuan, penataan ruang kembali (rekonstruksi), serta memastikan semua aktor yang terlibat, baik lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, maupun masyarakat, bergerak dalam koridor yang sama, terkoordinasi, dan sesuai dengan rencana induk. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, upaya penanganan dapat menjadi kacau, tumpang tindih, dan tidak efektif, sehingga menghambat proses pemulihan.

Dalam konteks penelitian penanganan pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, peran pemerintah sebagai regulator diejawantahkan melalui serangkaian tindakan spesifik. Pemerintah Kota Palu, baik sendiri maupun berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, bertugas menetapkan zona-zona berbahaya (zona merah) yang melarang (pembangunan kembali) di area terdampak likuifaksi parah, menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Induk Rekonstruksi yang baru, serta mengeluarkan perizinan khusus untuk perumahan dan infrastruktur publik. Sebagai regulator, pemerintah juga menetapkan standar bangunan tahan gempa, mengawasi proses relokasi warga,

dan memastikan program bantuan dan kompensasi dari berbagai pihak didistribusikan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesenjangan dan ketidakadilan. Dengan demikian, efektivitas pemerintah Kota Palu sebagai regulator akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayahnya.

Menurut Bapak Bacthiar, S,STP Selaku Kabag Pemerintahan Kota Palu “Menyatakan Bahwa Pemerintah Kota Palu, penyaluran bantuan perumahan pascabencana diatur melalui kriteria kepemilikan sertifikat tanah sebagai syarat utama penerima hunian tetap (huntar), sementara hunian sementara (huntara) diberikan sebagai solusi jangka pendek. Dari sisi kelembagaan, Pemkot Palu melalui BPBD berkolaborasi dengan kementerian terkait dan LSM untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, termasuk pembangunan langsung di wilayah terdampak seperti Tondo.(Hasil wawancara 4 Agustus 2025)

Kebijakan Pemerintah Kota Palu yang menetapkan kepemilikan sertifikat tanah sebagai syarat utama untuk menerima hunian tetap (huntar) merupakan sebuah langkah yang strategis dan berorientasi pada keadilan serta kejelasan hukum. Kriteria ini bertujuan memastikan bahwa bantuan perumahan yang permanen disalurkan kepada para pemilik lahan yang terdokumentasi secara legal, sehingga menghindari potensi sengketa di masa depan dan memastikan rebuild yang tertib. Sementara itu, penyediaan hunian sementara (huntara) menunjukkan respons yang cepat dan humanis sebagai solusi jangka pendek, mengakomodasi korban yang membutuhkan tempat tinggal segera sembari proses verifikasi data dan persiapan pembangunan huntar berlangsung. Pendekatan dua lapis ini mencerminkan manajemen penanganan pascabencana yang terstruktur.

Kolaborasi yang dibangun oleh BPBD Kota Palu dengan kementerian/lembaga pusat dan LSM merupakan indikator yang sangat positif dalam mengatasi tantangan anggaran daerah yang terbatas. Model kemitraan ini tidak hanya memperkuat kapasitas finansial tetapi juga memadukan sumber daya, expertise, dan jaringan logistik dari berbagai pihak, sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah nyata seperti pembangunan langsung di wilayah terdampak terberat, contohnya Tondo, membuktikan komitmen untuk memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Sinergi multipihak ini menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan masyarakat pascabencana.

Menurut Bachtiar, S.STP Kabag BPBD Kota Palu

“Menyatakan bahwa pemerintah penanganan pascabencana diatur melalui tiga regulasi utama: Perwali No. 7/2022, Pergub tentang relokasi, dan Inpres No. 8/2020. Program prioritas difokuskan pada relokasi warga ke Tondo dan Petobo, pembangunan hunian tetap, serta perbaikan infrastruktur. Tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antarinstansi, khususnya dalam pendataan bantuan dan pemulihan ekonomi sosial masyarakat. Namun, masalah sertifikasi lahan berhasil diatasi berkat program PTSL.” (Hasil Wawancara 8 Agustus 2025)

Kebijakan penanganan pascabencana Pemerintah Kota Palu menunjukkan kerangka regulasi yang komprehensif dan berjenjang, dimulai dari instruksi presiden (Inpres) sebagai panduan nasional, diperkuat dengan peraturan gubernur untuk menetapkan lokasi strategis, dan dijabarkan secara operasional melalui peraturan walikota. Hierarki kebijakan ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk program-program prioritas, seperti relokasi warga dari zona rawan bencana ke kawasan yang lebih aman, pembangunan hunian tetap, serta pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Fokus pada relokasi di daerah seperti

Tondo dan Petobo membuktikan komitmen untuk membangun kembali dengan prinsip "build back better" yang lebih resilien terhadap ancaman bencana di masa depan.

Meskipun memiliki dasar regulasi yang kuat dan program yang terarah, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala klasik, yakni koordinasi antarinstansi dalam pendataan dan pemulihan ekonomi-sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa memiliki peraturan yang baik saja tidak cukup; yang paling krusial adalah sinkronisasi data dan agenda kerja antarlembaga untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun, kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah sertifikasi lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) patut diacungi jempol. Keberhasilan ini tidak hanya menyelesaikan hambatan administratif terbesar tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset bagi masyarakat korban bencana, yang merupakan fondasi essential untuk pemulihan jangka panjang.

Menurut Samsir, S,H Kabig Dinas Sosial Kota Palu

“Menyatakan Bahwa Pemkot Palu telah membangun kerangka regulasi yang operasional dengan berlandaskan UU No. 24/2007, yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi bantuan yang terkoordinir dan diaudit ketat untuk mencegah penyimpangan, integrasi peraturan nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan SOP kebencanaan dan sanksi tegas (administratif & hukum) untuk menjamin akuntabilitas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.(Hasil Wawancara 12 Agustus 2025

Kerangka operasional yang dibangun Pemkot Palu menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Berlandaskan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai pijakan hukum tertinggi, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan mandat undang-undang tetapi juga

menerjemahkannya ke dalam mekanisme teknis yang jelas. Mekanisme distribusi bantuan yang terkoordinir dan diaudit secara ketat menjadi tulang punggung dari upaya ini. Koordinasi yang ketat memastikan bantuan sampai pada penerima yang tepat, sementara audit berfungsi sebagai sistem checks and balances yang vital untuk menjaga integritas seluruh proses penyaluran, sehingga setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Komitmen terhadap akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan tidak hanya diwacanakan tetapi dijamin melalui instrumen yang konkret. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebencanaan menstandarisasi tindakan setiap instansi yang terlibat, meminimalisir kebingungan dan tumpang tindih wewenang di lapangan. Yang lebih penting, kerangka ini diperkuat dengan sanksi tegas yang mencakup sanksi administratif hingga hukum bagi pelaku penyimpangan. Ancaman sanksi ini menciptakan efek jera dan sekaligus menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah area yang steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dana dan bantuan masyarakat benar-benar digunakan untuk pemulihan

Menurut ibu Nirnawita, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi "Kami segera menerbitkan SE dan instruksi walikota untuk mengatur distribusi logistik, memprioritaskan layanan kesehatan ibu dan anak, serta mengintegrasikan tim kesehatan dengan protokol penanganan bencana nasional. Kami juga yang mengalokasikan anggaran darurat untuk layanan psikologis." (Hasil Wawancara 20 Agustus 2025)

Upaya integrasi peraturan nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan strategi cerdas untuk memastikan keberlanjutan. Langkah ini memastikan bahwa pemulihan pascabencana bukanlah program yang terisolasi

dan berjalan sendiri, tetapi telah menjadi bagian integral dari visi dan misi pembangunan Kota Palu ke depan. Dengan demikian, setiap pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial pascabencana dirancang untuk tidak hanya memulihkan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana di masa yang akan datang, mewujudkan prinsip "Build Back Better" secara nyata.

Kota Palu dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan, baik dari APBD maupun APBN, memiliki dampak berlipat ganda dan berkelanjutan. Koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pusat menjadi kunci untuk menghindari duplikasi program, memastikan standar kualitas yang seragam, dan memaksimalkan penggunaan teknologi serta praktik terbaru dalam pembangunan yang tangguh. Pada akhirnya, pendekatan terintegrasi ini mengubah pola pikir dari sekadar "rekonstruksi" atau "rehabilitasi" pascabencana menuju "transformasi" yang fundamental, di mana setiap kebijakan dan aksi pembangunan secara sistematis telah menginternalisasikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana sebagai DNA dari pembangunan itu sendiri.

“Menurut Ibu Suryanti Lestari Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami”

“Menyatakan pada saat tsunami, pemerintah mulai mengatur. Misalnya soal penetapan zona merah yang tidak boleh dihuni lagi. Itu jelas sebuah aturan untuk keselamatan kami juga. Lalu ada program-program seperti hunian tetap (huntap). Meski prosesnya lama dan antriannya panjang, itu menunjukkan pemerintah mencoba mengatur penempatan kami yang kehilangan rumah secara lebih tertib. Namun, sering kali sosialisasi aturan

ini kurang jelas, sehingga banyak warga yang bingung dengan kriteria dan prosesnya”.(Hasil Wawancara 23 Agustus 2025)

Pemerintah perlahan-lahan mulai mengambil peran untuk mengatur dan memulihkan keadaan. Upaya nyata yang dilakukan antara lain dengan menetapkan zona merah yang dilarang untuk dihuni kembali. Kebijakan ini pada dasarnya dibuat untuk menjamin keselamatan warga di masa mendatang. Selain itu, program hunian tetap (huntap) juga dihadirkan sebagai solusi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Meski prosesnya berjalan lambat dengan antrian yang sangat panjang, kehadiran program ini menunjukkan niat pemerintah untuk menata penempatan korban secara lebih tertib dan terencana.

Upaya-upaya pemerintah ini sering kali tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dan jelas. Banyak warga yang mengeluhkan kebingungan mereka mengenai kriteria, prosedur, dan tahapan yang harus dilalui untuk mengakses program-program tersebut. Kurangnya komunikasi yang transparan ini menimbulkan ambiguitas di masyarakat, sehingga meski tujuannya baik, implementasinya belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh para korban yang paling membutuhkan.

“Menurut Ibu Lespa Lespia Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami”

“Menyatakan Warga Balaroa dilarang keras membangun kembali rumah di tanah mereka semula karena lokasi tersebut dinyatakan tidak aman. Larangan ini telah disampaikan melalui pengumuman di posko dan RT, serta dengan peta zonasi bahaya. Namun, sosialisasi dari pemerintah seringkali tidak merata dan tidak tuntas ke semua warga.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2025)

Aturan yang telah ditetapkan, kami sebagai warga masih diliputi kebingungan yang mendalam. Sosialisasi yang tidak merata dan tidak tuntas dari pihak berwenang menciptakan ruang bagi informasi simpang siur yang justru memperkeruh situasi. Ada tetangga yang bersikeras bahwa kami boleh kembali membangun asal memenuhi syarat tertentu, sementara sumber lain dari tingkat RT menyatakan larangan itu mutlak tanpa pengecualian. Kondisi ini tidak hanya memicu ketidakpastian tetapi juga memecah belah kami, warga yang seharusnya bersatu menghadapi musibah. Aturan yang seharusnya menjadi pedoman justru terasa tidak jelas karena lemahnya komunikasi dan penjabaran yang konsisten dari otoritas terkait. Di sisi lain, proses penyaluran bantuan mengalami evolusi yang patut diacungi jempol. Jika pada awalnya bantuan datang secara tidak teratur dan tidak merata, kini telah terbentuk sistem yang lebih terstruktur dan transparan. Kartu sembako yang kami terima telah memastikan bahwa kebutuhan pokok dapat terpenuhi, sementara dana bantuan perumahan mulai cair secara bertahap setelah melalui proses wawancara dan verifikasi data. Kemajuan ini memberikan secercah harapan dan kepercayaan bahwa pemulihan sedang berjalan, meskipun langkah tersebut masih sering terhambat oleh ketidakjelasan status tanah dan masa depan tempat tinggal kami yang sesungguhnya.

Pemerintah Kota Palu telah menjalankan peran sentralnya sebagai regulator dalam penanganan pascabencana dengan membangun kerangka regulasi yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari Instruksi Presiden, Peraturan Gubernur, hingga Peraturan Wali Kota, yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Peran ini dijawantahkan melalui tindakan strategis seperti

menetapkan zona merah, menyusun rencana tata ruang dan rekonstruksi, menetapkan standar bangunan tahan gempa, serta mengatur distribusi bantuan secara terkoordinir dan diaudit ketat untuk mencegah penyimpangan. Pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kejelasan hukum dengan menetapkan kepemilikan sertifikat tanah sebagai syarat bantuan hunian tetap (hunar) dan berhasil mengatasi kendala administrasi tanah melalui program PTSL.

Kolaborasi multipihak dengan pemerintah pusat dan LSM dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan memadukan sumber daya. Namun, di balik kekuatan regulasi dan komitmen ini, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, khususnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan tumpang tindih data serta sosialisasi yang tidak merata dan tidak tuntas kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan, informasi simpang siur, dan ketidakpastian di antara para korban, yang mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dan sinkronisasi operasional masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pemulihan yang benar-benar efektif dan berkeadilan.

6.2 Dinamisator

Pemerintah Kota Palu berperan sebagai penggerak utama dalam seluruh proses penanganan pasca bencana. Peran ini tidak hanya sekadar memberi perintah, tetapi lebih kepada menjadi motor yang memastikan semua upaya pertolongan, pemulihan, dan rehabilitasi berjalan dengan cepat dan terarah. Tanpa adanya penggerak yang aktif dan tegas, upaya penanganan bisa menjadi kacau, tidak terkoordinasi, dan lambat, sehingga memperparah penderitaan korban.

Pemerintah Kota, dalam hal ini, bertindak layaknya seorang pengemudi bus yang menentukan arah, kecepatan, dan memastikan semua penumpang sampai ke tujuan dengan selamat.

Dalam konteks bencana yang melanda Palu, peran sebagai dinamisor ini terwujud dalam bentuk koordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota Palu tidak bisa bekerja sendirian; mereka harus menyatukan dan menggerakkan banyak elemen seperti TNI/Polri, relawan dari dalam dan luar negeri, lembaga donor, serta masyarakat sendiri. Pemerintah Kota berperan sebagai penghubung dan penengah yang memastikan semua bantuan, tenaga, dan sumber daya yang masuk dapat disalurkan secara efektif ke titik-titik yang paling membutuhkan, tanpa tumpang tindih atau menimbulkan kekacauan baru.

indikator dinamisor ini mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Palu proaktif dan inisiatif dalam mengambil langkah-langkah strategis. Misalnya, seberapa cepat mereka membentuk posko komando, menerbitkan peraturan darurat, menggalang bantuan, serta mengambil keputusan-keputusan krusial seperti membuka akses jalan yang terputus atau menetapkan lokasi pengungsian yang aman. Keberhasilan pemerintah sebagai dinamisor dapat dilihat dari kelancaran dan keteraturan seluruh rangkaian operasi tanggap darurat dan pemulihan, yang pada akhirnya menentukan kecepatan pulihnya masyarakat Kota Palu dari musibah yang sangat dahsyat ini.

Menurut Bapak Bacthiar, S,STP Selaku Kabag Pemerintahan Kota Palu
“Pemerintah Kota Palu bertindak sebagai penggerak utama yang menghubungkan dan mengoordinasikan seluruh pihak. Peran ini mencakup koordinasi dengan Kementerian PUPR dan LSM untuk memastikan hunian tepat sasaran, serta kolaborasi dengan masyarakat membentuk Tim Tangguh Bencana di 46 desa. Pemerintah juga mengintegrasikan

*pendidikan kebencanaan dengan mengadaptasi kurikulum dari Jepang”.
(Hasil Wawancara 4 Agustus 2025)*

Pemerintah Kota Palu menunjukkan peran yang strategis dan progresif dalam membangun ketangguhan bencana dengan bertindak sebagai dinamisator dan penghubung utama. Peran ini tidak hanya sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai penggerak aktif yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian seperti PUPR, LSM, hingga masyarakat lokal. Melalui koordinasi yang sinergis, mereka berhasil memastikan bahwa bantuan hunian tepat sasaran dan membentuk Tim Tangguh Bencana yang tersebar di 46 desa, yang menjadi ujung tombak kesiapsiagaan di tingkat akar rumput. Pendekatan kolaboratif ini membuktikan bahwa penanganan bencana yang efektif memerlukan orchestarsi dari berbagai elemen, dan pemerintah kota berhasil memimpin orchestra tersebut.

Lebih dari itu, upaya Pemerintah Kota Palu tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi telah melangkah ke arah pembangunan budaya kebencanaan yang berkelanjutan dan terdidik. Dengan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dan mengadaptasi kurikulum dari Jepang, sebuah negara yang telah maju dalam manajemen bencana, menunjukkan visi jangka panjang dan komitmen untuk membangun generasi yang lebih siap. Langkah ini mentransformasi paradigma dari sekadar responsif menjadi preventif-edukatif. Secara keseluruhan, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang optimal dengan memobilisasi semua sumber daya, pengetahuan, dan jaringan untuk menciptakan sebuah sistem penanganan bencana yang integratif, proaktif, dan dapat diandalkan untuk masa depan.

Menurut Samsir, S.H Kabag DPBD Kota Palu

“Peran kami di Pemkot Palu adalah sebagai penggerak dan penghubung yang mengoordinasi semua pihak. Kami menjembatani koordinasi antara Kementerian PUPR dan LSM untuk memastikan bantuan hunian tepat sasaran. Selain itu, kami berkolaborasi dengan masyarakat membentuk Tim Tangguh Bencana yang sudah terbentuk di 46 desa. Di bidang pendidikan, kami mengadaptasi dan menerapkan kurikulum kebencanaan dari Jepang. Intinya, tugas kami memastikan semua pihak bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri..”(Hasil Wawancara 8 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Kota Palu, terungkap bahwa Pemerintah Kota Palu telah mengambil peran yang sangat strategis dan aktif sebagai dinamisator dalam proses pemulihan pascabencana. Peran ini tidak hanya sekadar sebagai regulator, tetapi lebih sebagai penggerak utama yang memastikan seluruh sektor dan pemangku kepentingan bergerak secara sinergis. Melalui koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pemerintah berhasil menciptakan sebuah sistem pendampingan yang holistik, yang menangani tidak hanya aspek fisik rekonstruksi tetapi juga aspek yang lebih dalam dan manusiawi, yaitu pemulihan ekonomi dan sosial para penyintas.

Implementasi dari peran dinamisator ini terwujud dalam langkah-langkah yang sangat konkret dan terarah. Di bidang ekonomi, pemerintah secara aktif melibatkan OPD yang membidangi UMKM dan nelayan untuk memastikan para penyintas memiliki mata pencaharian dan dapat mengembangkan usaha mereka di lokasi baru. Pendekatan ini sangat krusial karena membangun kembali perekonomian masyarakat berarti memberikan mereka kembali kemandirian dan harapan untuk masa depan. Secara paralel, di bidang sosial, pemerintah juga menyediakan pendampingan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan

lingkungan barunya, yang tidak hanya berupa rumah baru, tetapi juga komunitas dan dinamika sosial yang mungkin sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya.

Menurut Farid A, Modjo Kabig Dinas sosial Kota Palu

"Menyatakan Pemkot Palu memiliki strategi penanganan bencana yang terstruktur dalam dua fase utama. Pada fase darurat, fokus utama adalah penyelamatan nyawa, koordinasi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Selanjutnya, fase pemulihan diisi dengan pembangunan infrastruktur, pemulihan trauma, dan dukungan ekonomi. Seluruh proses melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Kerja sama antarinstansi serta pemanfaatan media dan tokoh masyarakat membuat penanganan ini efektif, merata, dan berkelanjutan." (Hasil Wawancara 12 Agustus 2025)

Strategi penanganan bencana yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menunjukkan kerangka kerja yang sangat komprehensif dan terstruktur secara jelas. Dimulai dari fase tanggap darurat, prioritas utama difokuskan pada upaya penyelamatan jiwa, koordinasi komando yang terpusat untuk meminimalisir tumpang tindih, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara cepat dan merata. Transisi dari fase darurat ke pemulihan dilakukan secara terencana, menandai bahwa pendekatan mereka bukan hanya reaktif tetapi telah memikirkan langkah-langkah berkelanjutan sejak awal.

Menurut ibu Nirnawita, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi

"Kami membentuk posko komando dan memastikan semua lima tim penyakit yang ada berkoordinasi dengan cepat. Kami menggerakkan relawan kesehatan, mengadakan rapat koordinasi harian dengan TNI-Polri, NGO, dan organisasi profesi seperti IDI untuk menyamakan persepsi dan langkah." (Hasil Wawancara 20 Agustus)

Pada fase pemulihan, strategi Pemkot Palu semakin terlihat Jelas dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama: rehabilitasi fisik, psikososial, dan ekonomi. Yang patut dicatat adalah pelibatan aktif masyarakat dan kelompok

rentan dalam setiap prosesnya, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberdayakan. Koordinasi yang kuat antarlembaga, diperkuat dengan pemanfaatan media lokal dan tokoh masyarakat yang dipercaya warga, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan proses pemulihan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat.

Menurut Ibu Suryanti Lestari Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami

“Di awal-awal, justru masyarakat dan relawan dari luar yang lebih aktif bergerak. Pemerintah terlihat kewalahan. Tapi setelah keadaan darurat berlalu, pemerintah mulai mengadakan koordinasi-koordinasi. Misalnya dengan membentuk posko-posko rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka mencoba menggerakkan dinas-dinas terkait untuk turun langsung. Namun, menurut saya, peran sebagai penggerak ini masih bisa ditingkatkan. Sering terasa ada ego sektoral antar dinas, sehingga bantuan atau program tidak sampai dengan cepat.” (Hasil Wawancara 23 Agustus 2025)

Pada masa-masa awal tanggap darurat, inisiatif justru banyak datang dari masyarakat dan relawan dari luar daerah. Pemerintah setempat terlihat kewalahan menghadapi skala bencana yang terjadi, sehingga respons awal terkesan lambat dan tidak terkoordinasi. Akan tetapi, setelah status darurat berakhir, pemerintah mulai mengambil peran dengan menggelar berbagai rapat koordinasi. Upaya konkret dilakukan dengan membentuk posko-posko rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memusatkan informasi dan bantuan, serta menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan. Meskipun demikian, peran pemerintah sebagai penggerak dalam pemulihan pascabencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas adalah masih kuatnya ego sektoral antar dinas atau instansi. Hal ini menyebabkan

koordinasi tidak berjalan maksimal, sehingga program bantuan dan layanan seringkali tidak sampai kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran.

Menurut Ibu Lespa Lespia Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami

“Menyatakan Di awal-awal masyarakat bergotong royong mandiri karena pemerintah kewalahan. Bantuan terkoordinasi dari pemerintah baru datang setelah beberapa minggu. Program huntara memberikan harapan bagi korban. Namun, program pemberdayaan ekonomi pasca-bencana tidak dirasakan. Masyarakat akhirnya berusaha mandiri secara ekonomi dengan usaha sendiri atau bantuan LSM.” (Hasil Wawancara 24 Agustus 2025)

Pasca tempat tinggal sementara terbentuk, terasa sekali vakumnya program yang bertujuan memulihkan kemandirian ekonomi. Rasa kebingungan dan ketidakpastian mulai menyelimuti kembali. Kami pun lebih banyak bergerak secara mandiri, berinisiatif sendiri, atau mengandalkan bantuan dari LSM-LSM yang datang dengan program pelatihan dan modal usaha yang terbatas. Pemerintah seolah memandang bahwa bantuan telah selesai diberikan ketika atap telah tertutup, tanpa menyadari bahwa pemulihan yang sesungguhnya adalah ketika kami dapat kembali berdikari, menggerakkan roda ekonomi keluarga dari keterpurukan. Kami tidak hanya butuh tempat tinggal, tetapi juga "peta" untuk mencari nafkah di kehidupan yang baru ini.

Pemerintah Kota Palu memainkan peran yang strategis dan multi-dimensional sebagai dinamisator utama dalam penanganan pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Peran ini tidak hanya terbatas sebagai regulator, tetapi lebih sebagai penggerak aktif, penghubung, dan fasilitator yang memastikan seluruh upaya penanganan berjalan terkoordinasi, sinergis, dan terarah. Secara khusus, peran pemerintah sebagai dinamisator terwujud dalam

beberapa bentuk. Pertama, dalam hal koordinasi, pemerintah berhasil menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI/Polri, kementerian (seperti PUPR), LSM, relawan, dan masyarakat, untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kedua, dalam hal pengambilan keputusan strategis, pemerintah mengambil inisiatif membentuk posko komando, menerbitkan regulasi darurat, serta membuka akses jalan dan lokasi pengungsian. Ketiga, dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik dengan menyediakan hunian, tetapi juga membangun ketangguhan masyarakat melalui pembentukan Tim Tangguh Bencana di 46 desa dan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dengan mengadaptasi kurikulum dari Jepang.

Namun, di balik sejumlah capaian tersebut, tantangan dan kritik tetap ada. Pada fase tanggap darurat awal, pemerintah diakui terlihat kewalahan sehingga inisiatif banyak berasal dari masyarakat dan relawan. Ego sektoral antar dinas juga dianggap masih menghambat koordinasi dan kecepatan penyaluran bantuan. Selain itu, dari perspektif masyarakat, peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemulihan ekonomi dinilai masih kurang. Program pemberdayaan untuk membantu korban kembali mandiri secara ekonomi dianggap vakum, sehingga masyarakat banyak mengandalkan inisiatif sendiri atau bantuan LSM. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Palu telah menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam memimpin proses pemulihan yang kompleks dengan bertindak sebagai penggerak sentral. Mereka telah berhasil menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dari darurat hingga rehabilitasi. Namun, untuk menjadi

dinamisator yang optimal, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor yang lebih mulus dan perhatian yang lebih besar pada aspek pemberdayaan ekonomi jangka panjang guna memastikan pemulihan yang benar-benar holistik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

5.3 Fasilitator

Sebagai fasilitator, peran pertama Pemerintah Kota Palu adalah menciptakan dan menyediakan berbagai kemudahan akses bagi para penyintas dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan. Peran ini diwujudkan dengan membuka posko-posko pengaduan dan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya posko ini, pemerintah bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan korban, seperti tempat tinggal sementara, kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan, dengan bantuan yang datang dari berbagai pihak, baik dari tingkat pusat maupun organisasi non-pemerintah.

pemerintah juga memfasilitasi dengan cara menjadi penghubung dan koordinator utama antar berbagai pihak yang terlibat. Pasca bencana, bantuan datang dari mana saja, seperti relawan, TNI/Polri, LSM, dan donatur. Tanpa koordinasi yang baik, bantuan ini bisa menumpuk di satu tempat atau tidak tepat sasaran. Di sinilah peran pemerintah sangat penting untuk mengatur agar semua sumber daya dan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara merata dan efisien kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan.

peran sebagai fasilitator juga berarti pemerintah memastikan bahwa proses pemulihan berjalan lancar dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang

diperlukan. Contohnya, pemerintah memfasilitasi pembangunan hunian sementara (huntara) dengan menyediakan lahan dan izin yang diperlukan, mempermudah proses perizinan rekonstruksi bangunan, serta memastikan akses jalan ke daerah-daerah yang terdampak dapat segera diperbaiki. Dengan menyediakan "jalan" baik secara harfiah maupun administratif, pemerintah memungkinkan masyarakat dan para mitra untuk bergerak lebih cepat dalam membangun kembali kehidupan dan perekonomian mereka.

Menurut Bapak Bacthiar, S,STP Selaku Kabag Pemerintahan Kota Palu
“Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Palu menangani pascabencana dengan dua pendekatan utama. Secara fisik, dengan membangun hunian sementara dan permanen bagi pemilik sertifikat, didukung PUPR dan LSM. Secara non-fisik, melalui penguatan ketahanan masyarakat dengan tim siaga desa dan integrasi pendidikan kebencanaan di sekolah. .” (Hasil Wawancara 4 Agustus 2025)

Dari hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Kota Palu, terungkap bahwa peran pemerintah dalam penanganan pascabencana diwujudkan melalui pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik tetapi juga penguatan komunitas. Prioritas darurat diwujudkan dengan menyediakan hunian sementara (huntara), dilanjutkan dengan pembangunan hunian permanen (huntap) yang memprioritaskan kepemilikan sertifikat tanah untuk menjamin keadilan dan mencegah sengketa. Pemerintah Kota Palu tidak bekerja sendiri, namun berkolaborasi strategis dengan Kementerian PUPR serta LSM seperti NJOK dan JOKA untuk mengoptimalkan sumber daya. Yang lebih utama, dilakukan pergeseran paradigma dari sekadar membangun infrastruktur kepada membangun ketahanan komunitas dengan membentuk Tim Tangguh Bencana di 46 desa dan mengintegrasikan modul kesadaran bencana ke dalam kurikulum

pendidikan lokal. Komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan dan program ketahanan masyarakat menjadi agenda prioritas agar komunitas tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Menurut Samsir, S,H Kabag DPBD Kota Palu

“Menyatakan Pemerintah Kota Palu telah menjalankan perannya secara komprehensif dalam penanganan pascabencana, mulai dari regulasi, rehabilitasi infrastruktur, relokasi, pendampingan sosial-ekonomi, hingga pendidikan kebencanaan. Namun, tantangan terkait koordinasi data dan pendampingan pascarelokasi masih perlu diperkuat untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan.”(Hasil Wawancara 8 Agustus 2025

Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk fokus pada penguatan dua aspek krusial ini. Sinergi antar dinas dan lembaga terkait akan ditingkatkan untuk menciptakan sistem basis data terpadu yang akurat dan dapat diakses secara real-time. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih data dan memastikan bantuan serta program pemulihan tepat sasaran. Selain itu, program pendampingan pascarelokasi tidak akan berhenti pada penyerahan kunci rumah, tetapi akan diperkuat dengan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun mata pencaharian yang berkelanjutan, dan kembali membangun kohesi sosial yang mungkin terputus akibat proses relokasi.

Menurut Farid A Madjo Kabid Dinas sosial Kota Palu

“Menyatakan Bahwa Pemerintah Kota Palu menjalankan respons pemulihan bencana yang terkoordinir dengan beberapa fokus utama: penyaluran logistik yang cepat dan adaptif ke daerah terdampak, layanan kesehatan mental (trauma healing) untuk korban, pemulihan akses pendidikan dengan konsep sekolah aman, penerbitan dokumen kependudukan bagi yang kehilangan melalui layanan jemput bola, serta

pembangunan hunian sementara (huntara) yang layak dan aman dari risiko bencana lanjutan.” (Hasil Wawancara 12 Agustus 2025)

Keberhasilan program-program tersebut tidak lepas dari kolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas jangkauan distribusi logistik di medan yang sulit dan menyediakan tenaga profesional untuk pendampingan psikososial. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan dari program yang telah dirintis, seperti transisi dari huntara ke hunian tetap serta menjaga akses pendidikan dan kesehatan mental bagi korban yang masih mengalami trauma, agar pemulihan dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Keberhasilan berbagai program penanggulangan pascabencana tersebut pada hakikatnya memang bersumber dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi multipihak. Kolaborasi erat dengan TNI/Polri menjadi tulang punggung dalam aspek logistik dan keamanan. Pengalaman dan infrastruktur TNI/Polri dalam menembus medan yang terisolir dan berat sangat krusial untuk memastikan bantuan sampai kepada para korban yang paling membutuhkan tepat waktu. Di sisi lain, kontribusi relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih terfokus pada pendampingan manusiawi, seperti menyediakan tenaga pendamping psikososial yang profesional. Pendampingan ini vital untuk mengatasi trauma psikologis korban, yang seringkali terlupakan meski bantuan fisik telah tersedia. Sementara itu, organisasi internasional berperan dalam menyediakan pendanaan,

teknologi, dan keahlian berstandar global yang melengkapi sumber daya lokal, sehingga respon yang dilakukan lebih komprehensif dan terukur.

Menurut ibu Nirnawita, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi "Kami menyediakan data terdampak, membuka akses jalan untuk distribusi bantuan, mengatur tempat evakuasi, serta mengalokasikan dana untuk mentoring psikolog yang bekerja sama dengan ahli seperti Dr. Kijuwan. Kami memastikan dukungan operasional sampai ke lapangan."(Hasil Wawancara 20 Agustus 2025)

Selain pemulihan fisik dan psikologis, Pemerintah Kota Palu juga memprioritaskan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi tulang punggung keberlangsungan kehidupan pascabencana. Program seperti perbaikan pasar tradisional, bantuan modal usaha bagi para pedagang dan nelayan, serta pelatihan keterampilan baru menjadi bagian integral dari strategi pemulihan. Hal ini dilakukan karena pemulihan ekonomi merupakan penggerak utama bagi terciptanya kemandirian masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sehingga mereka dapat bangkit dan membangun kembali kehidupannya dengan lebih bermartabat.

Menurut Ibu Suryanti Lestari Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami "Masnyarakat Bantuan pemerintah, seperti huntap di Sigi, sering tidak tepat sasaran karena lokasinya jauh dari pusat kota tempat masyarakat bekerja. Hal ini justru menimbulkan masalah transportasi baru dan menghambat pemulihan mata pencaharian. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan seharusnya lebih mempertimbangkan kedekatan dengan sumber pekerjaan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan."(Hasil Wawancara 23 Agustus 2025)

Pada minggu-minggu pertama pascabencana, kebutuhan mendesak seperti tenda, air bersih, dan makanan masih sangat bergantung pada kedermawanan dan solidaritas masyarakat. Kehadiran pemerintah memang dirasakan, namun

kapasitas dan respons yang diberikan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menanggung seluruh beban para korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan nyata di lapangan pada fase darurat. Untuk jangka panjang, pemerintah mulai menghadirkan fasilitas yang lebih permanen, seperti pembangunan hunian sementara (huntap) di Kabupaten Sigi. Meski merupakan bentuk perhatian, lokasi huntap yang jauh dari pusat kota justru menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi para pengungsi yang bekerja atau memiliki mata pencaharian di Palu. Dengan demikian, kehadiran pemerintah sebagai fasilitator dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena belum menyentuh kebutuhan utama korban, terutama dalam hal memulihkan sumber ekonomi dan kehidupan mereka.

Menurut Ibu Lespa Lespia Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami

“Menyatakan Pemerintah telah memberikan fasilitas dasar seperti hunian sementara (huntara) dan perbaikan infrastruktur, namun upaya tersebut masih sangat lambat dan tidak merata. Kondisi air bersih dan MCK awalnya sulit, meski kini sudah lebih teratur di lokasi penulis. Namun, banyak korban di lokasi lain yang menerima bantuan lebih sedikit dan nasibnya lebih buruk.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2025)

Pembangunan Huntara (Hunting Sementara) sebagai tempat tinggal, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah, serta pengadaan air bersih dan MCK yang mulai teratur menunjukkan bahwa intervensi pemerintah telah sampai di lapangan dan secara bertahap menunjukkan perkembangan. Hal ini merupakan titik terang yang penting, karena menunjukkan bahwa proses rekonstruksi, meski lambat, sedang berjalan. Namun di sisi lain, narasumber menyoroti dua masalah krusial yang sering terjadi dalam penanganan pascabencana kecepatan dan

kesetaraan. Kata "sangat lambat dan tidak merata" merupakan inti dari kritik ini. Kelambatan yang berarti memperpanjang penderitaan pengungsi, sementara ketidakmerataan menciptakan ketidakadilan baru di antara korban yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Pengalaman teman-teman narasumber yang mendapat bantuan lebih sedikit di titik lain memperkuat kesan bahwa distribusi bantuan dan pembangunan infrastruktur mungkin tidak terkoordinir dengan baik atau berbasis pada *assessment* kebutuhan yang komprehensif.

Pemerintah Kota Palu memainkan peran multidimensi sebagai fasilitator, koordinator, dan penyedia layanan dalam penanganan pascabencana. Peran sebagai fasilitator diwujudkan dengan membuka posko pengaduan, mempermudah perizinan, dan menyediakan infrastruktur pendukung seperti hunian sementara (*huntara*) dan perbaikan jalan. Sebagai koordinator, pemerintah menjadi penghubung utama yang mengatur sinergi antar berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR, TNI/Polri, LSM, dan relawan, untuk memastikan distribusi bantuan yang merata dan efisien serta menghindari tumpang tindih. Selain pemulihan fisik, pemerintah juga berfokus pada pembangunan ketahanan komunitas melalui pendidikan kebencanaan di sekolah, pembentukan Tim Tangguh Bencana di desa-desa, serta program pemulihan sosial-ekonomi seperti bantuan modal usaha. Namun, di balik upaya komprehensif ini, tantangan masih ada, khususnya dalam hal kecepatan dan kesetaraan distribusi bantuan, koordinasi data, serta pendampingan pascarelokasi yang berkelanjutan untuk memastikan pemulihan yang benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan bagi semua korban.

5.4 Katalisator

Dalam konteks pemerintahan dan penanganan bencana, katalisator dimaknai sebagai suatu peristiwa, kebijakan, atau figur yang berperan sebagai pemercepat (accelerator) dan pemicu (trigger) bagi terjadinya perubahan mendasar dan sistematis. Peristiwa bencana alam dahsyat, seperti yang melanda Kota Palu, seringkali berfungsi sebagai katalisator yang memaksa pemerintah untuk keluar dari rutinitas dan kebijakan normal (business-as-usual). Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi bukan hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga menguji dan seringkali mematahkan kerangka kelembagaan, regulasi, dan kapasitas respons yang sudah ada. Dengan demikian, bencana ini menciptakan keadaan darurat yang memunculkan tekanan politik dan sosial yang sangat besar, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin sebelumnya terhambat oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, atau kurangnya urgensi politik.

Dalam studi kasus Kota Palu, trilogi bencana pada September 2018 tersebut berperan sebagai katalisator utama yang memaksa Pemerintah Kota untuk melakukan transformasi dalam pendekatan penanganan bencana. Peristiwa ini mengkatalisis perubahan dari sistem yang mungkin lebih berfokus pada penanggulangan darurat konvensional menuju suatu pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan berorientasi pada pembangunan kembali (build back better). Momentum pasca-bencana memicu evaluasi mendalam terhadap Rencana Kontinjensi dan Rencana Aksi Daerah Tanggap Bencana yang sudah ada, mendorong percepatan penerbitan peraturan-peraturan khusus, dan memunculkan inisiatif-inisiatif baru seperti fokus pada penanganan likuifaksi yang sebelumnya

tidak banyak terpetakan dalam kebijakan. Dengan kata lain, bencana menjadi titik tolak (turning point) yang mengakselerasi lahirnya kebijakan, restrukturisasi kelembagaan, dan alokasi sumber daya yang ditujukan tidak hanya untuk pemulihan reaktif, tetapi juga untuk membangun ketahanan kota yang lebih kuat dalam jangka panjang.

*Menurut Bapak Bacthiar, S,STP Selaku Kabag Pemerintahan Kota Palu
“Pemerintah Kota Palu bertindak sebagai katalisator dengan mempercepat pemulihan melalui koordinasi multi-pihak dan regulasi tepat sasaran, seperti syarat sertifikat tanah untuk bantuan hunian. Mereka memberdayakan masyarakat dengan membentuk Tim Tangguh Bencana di 46 desa dan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan yang diadaptasi dari model Jepang. Fokusnya bergeser dari pembangunan infrastruktur ke penguatan ketahanan komunitas untuk menciptakan sistem yang lebih resilient dan berkelanjutan.”(Hasil Wawancara 4 Agustus 2025)*

Hasil wawancara memperlihatkan secara nyata bahwa Pemerintah Kota Palu benar-benar berfungsi sebagai katalisator transformatif yang mengubah tantangan bencana menjadi peluang untuk membangun tata kelola yang lebih baik. Peran katalisator ini tidak hanya dimanifestasikan melalui koordinasi strategis yang menghubungkan berbagai aktor seperti BPBD, kementerian/lembaga, hingga organisasi internasional, tetapi juga melalui kebijakan yang inovatif dan berani, seperti penerapan syarat sertifikat tanah untuk memastikan bantuan hunian tepat sasaran serta terciptanya kepastian hukum. Lebih dari itu, upaya memberdayakan masyarakat dengan membentuk Tim Tangguh Bencana di 46 kelurahan dan mengintegrasikan model pendidikan kebencanaan Jepang yang diadaptasi secara lokal, menunjukkan komitmen untuk mentransfer kapasitas dan pengetahuan kepada komunitas, sehingga mempercepat peralihan dari paradigma responsif-jangka pendek menuju penguatan ketahanan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Menurut Samsir, S.H Kabag BPDB Kota Palu

“Pemerintah Kota Palu berperan sebagai katalisator dalam pemulihan pascabencana dengan menerapkan regulasi seperti Perwal No. 7/2022 dan program R3P. Program ini mencakup relokasi, bantuan perumahan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi melalui pendampingan OPD. Meski ada tantangan koordinasi, BPBD bertindak sebagai koordinator untuk memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan pemulihan yang berkelanjutan.”(Hasil Wawancara 8 Agustus 2025).

Kepala BPBD tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Palu secara institusional telah mengkonsolidasikan peran katalisatornya ke dalam kerangka regulasi dan program yang sangat konkret. Penerapan Peraturan Walikota (Perwal) No. 7 Tahun 2022 dan instruksi untuk menjalankan Inpres No. 8 Tahun 2020 menjadi instrumen hukum yang mempercepat dan memandu seluruh aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebijakan ini dioperasionalkan melalui program R3P yang komprehensif, mencakup aspek fisik seperti relokasi dan pembangunan infrastruktur, aspek ekonomi melalui pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aspek kultural jangka panjang dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan. Langkah-langkah sistematis ini menunjukkan esensi dari katalisator, yaitu mengubah momentum bencana menjadi sebuah landasan untuk membangun tata kelola yang lebih terstruktur, multidimensi, dan berorientasi pada prinsip "build back better".

peran katalisator tersebut tidak berjalan tanpa tantangan. Kepala BPBD secara terbuka mengakui adanya hambatan dalam koordinasi antar-pemangku kepentingan dan menjamin keberlanjutan program pasca masa tanggap darurat. Dalam konteks inilah peran BPBD sebagai koordinator sekaligus fasilitator

menjadi krusial. BPBD tidak hanya memastikan semua pihak bergerak dalam satu peta jalan yang sama, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial-ekonomi, sehingga kapasitas masyarakat menjadi tangguh dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya Pemerintah Kota Palu sebagai katalisator bukanlah tentang menciptakan pemulihan yang instan, melainkan tentang memicu dan memelihara sebuah proses transformasi sistemik menuju ketahanan kota yang lebih kokoh di masa depan.

Menurut Farid A, Modjo Kabag Kadis sociL Kota Palu

*“Menyatakan Pemerintah Kota Palu berperan sebagai katalisator dan fasilitator dengan empat strategi utama. Keempatnya adalah penguatan kelembagaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, transformasi tata ruang berbasis mitigasi, dan akselerasi teknologi konstruksi tahan gempa. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Palu membangun ketangguhan bencana untuk mewujudkan kota yang lebih aman dan berkelanjutan”.
.” Hasil Wawancara 12 Agustus 2025)*

Pemkot Palu berupaya mewujudkan pembangunan kota yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan bencana di masa depan. Upaya ini bukan hanya sekadar reaksi terhadap peristiwa masa lalu, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk melindungi nyawa, mata pencaharian, dan warisan budaya masyarakat. Penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput memastikan bahwa kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab bersama, sementara kolaborasi dengan akademisi dan ahli menjamin bahwa setiap kebijakan dan langkah pembangunan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan data yang akurat. Transformasi tata ruang dan adopsi teknologi konstruksi tahan gempa kemudian menjadi manifestasi fisik dari strategi ini, yang secara proaktif membentuk lingkungan binaan yang mampu menyerap dan beradaptasi dengan guncangan,

sehingga pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem ketangguhan yang menyeluruh dan terpadu.

Menurut ibu Nirnawita, SKM., M.Kes Sebagai Kasi Surpelen dan imunisasi "Menyatakan Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran kami adalah mempertemukan kebutuhan di lapangan dengan bantuan dari luar, mendorong kolaborasi antara psikolog dengan komunitas lokal, dan mengembangkan program jangka pendek yang memicu semangat gotong royong masyarakat untuk bangkit kembali."(Hasil Wawancara 20 Desember 2025)

Menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan mendesak di lapangan dengan sumber daya dan bantuan dari pihak luar. Kami tidak bekerja sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator aktif yang mendorong kolaborasi, misalnya dengan mempertemukan tenaga psikolog dengan komunitas lokal agar dukungan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan cara ini, setiap bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Selain itu, kami mengembangkan program jangka pendek yang dirancang khusus untuk memulihkan semangat dan memicu kembali budaya gotong royong dalam masyarakat. Program-program ini bertujuan membangkitkan inisiatif dari dalam komunitas itu sendiri, sehingga proses pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Harapannya, masyarakat tidak hanya sekedar pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi masa depan.

Menurut Ibu Suryanti Lestari Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami

"Menurut saya. Banyak NGO asing dan nasional yang datang dengan program bagus, tetapi koordinasi dengan pemerintah daerah sering tidak sinkron. Ada informasi yang tidak tersalurkan dengan baik. Pemerintah seharusnya menjadi penghubung utama yang mempertemukan kebutuhan kami dengan bantuan yang ada dari pihak ketiga. Sayangnya, sering terjadi tumpang tindih program atau malah ada daerah yang justru tidak tersentuh. Pemerintah kurang 'mempercepat' proses bantuan itu agar tepat sasaran."(Hasil Wawancara 23 Agustus 2025)

Masyarakat menyoroti adanya kesenjangan koordinasi antara program-program bantuan yang digulirkan oleh LSM, baik asing maupun nasional, dengan pemerintah daerah. Informasi mengenai bantuan seringkali tidak tersalurkan dengan baik, sehingga program-program yang pada dasarnya bagus tidak dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan harapan agar pemerintah dapat berperan lebih aktif sebagai penghubung utama yang mempertemukan kebutuhan riil di lapangan dengan beragam bentuk bantuan yang tersedia dari pihak ketiga.

Akibat dari lemahnya koordinasi ini, sering terjadi tumpang tindih program di satu daerah, sementara daerah lainnya justru tidak tersentuh sama sekali. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menjadi penerima laporan, tetapi lebih proaktif dalam mempercepat dan mempermudah proses penyaluran bantuan. Optimalisasi peran pemerintah sebagai fasilitator dinilai crucial agar setiap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Menurut Ibu Lespa Lespia Sebagai Masyarakat yang terkena dampak tsunami

"Pembangunan rumah tetap saja oleh masyarakat sendiri dengan kemampuan masing-masing, hanya dipindah lokasinya. Sistem peringatan dini tsunami yang baru memang dipasang, tapi sosialisasi cara kerjanya kurang. Yang terjadi justru kami yang berubah sendiri, menjadi lebih waspada. Pemerintah seolah hanya bereaksi, bukan memimpin perubahan besar yang berarti. Momentum untuk membuat Palu benar-benar baru dan lebih baik sepertinya belum sepenuhnya diraih. Masih banyak rencana yang masih di atas kertas dan belum kami rasakan sebagai masyarakat kecil."

Terlihat bahwa proses pemulihan Palu pascabencana dianggap gagal menangkap momentum untuk melakukan transformasi yang berarti. Pemerintah

dinilai cenderung bersikap reaktif dan tidak transformatif, hanya menyelesaikan masalah secara tambal sulam alih-alih memimpin dengan visi "build back better" yang berujung pada kesan bahwa momentum untuk menciptakan Palu yang benar-benar baru telah terlewat. Hal ini diperparah dengan kesenjangan yang lebar antara rencana dan realita, di mana berbagai rencana besar masih menjadi wacana di atas kertas dan tidak dirasakan implementasinya oleh masyarakat kecil, membuat mereka merasa seperti penonton di tanah sendiri. Dalam kekosongan kepemimpinan ini, masyarakat justru menunjukkan ketangguhannya dengan melakukan pemberdayaan diri yang setengah hati, dimana mereka terpaksa membangun kembali rumah dengan kemampuan sendiri tanpa program bantuan yang memadai, sehingga pada dasarnya mereka ditinggalkan untuk mengurus diri sendiri dalam proses rekonstruksi yang seharusnya dipimpin oleh negara. Selain itu, pendekatan pemerintah dinilai gagal dalam menciptakan sistem yang manusiawi, seperti terlihat pada pemasangan sistem peringatan dini tsunami tanpa sosialisasi yang memadai; teknologi canggih (hardware) menjadi tidak berarti tanpa masyarakat yang teredukasi (software), sehingga yang terjadi adalah masyarakat mengandalkan kewaspadaan sendiri yang menimbulkan kecemasan dan kerentanan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palu memainkan peran sebagai katalisator transformatif dalam penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Peran ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan strategis dan inovatif yang bertujuan mengakselerasi pemulihan serta membangun ketahanan yang lebih kokoh untuk jangka panjang. Di satu sisi, pemerintah berhasil mengkonsolidasikan upaya

melalui kerangka regulasi seperti Perwal No. 7/2022 dan program komprehensif R3P yang mencakup relokasi, rehabilitasi infrastruktur, penguatan ekonomi, dan integrasi pendidikan kebencanaan. Kolaborasi multi-pihak dengan BPBD, kementerian/lembaga, LSM, dan organisasi internasional juga diperkuat untuk memastikan koordinasi dan pendampingan masyarakat. Selain itu, inisiatif seperti pembentukan Tim Tangguh Bencana di 46 kelurahan dan adopsi model pendidikan kebencanaan Jepang yang diadaptasi secara lokal menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat dan mentransfer kapasitas.

Peran katalisator ini tidak lepas dari tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi dan keberlanjutan program. Masyarakat menyoroti lemahnya sinkronisasi antara program bantuan NGO dengan pemerintah daerah, yang mengakibatkan tumpang tindih bantuan dan ketimpangan penyaluran. Implementasi di lapangan juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan visi "build back better", di mana masyarakat merasa masih harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk rekonstruksi rumah, sosialisasi sistem peringatan dini yang kurang, dan kesenjangan antara rencana di atas kertas dengan realita yang dirasakan warga. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Kota Palu telah meletakkan dasar-dasar institutional dan kebijakan yang progresif, efektivitas peran katalisatornya masih perlu ditingkatkan dengan memastikan kepemimpinan yang lebih transformatif, koordinasi yang lebih solid, serta implementasi yang tepat sasaran agar momentum pascabencana benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kota yang lebih resilient dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Palu telah menjalankan peran yang multidimensi dan strategis dalam penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, dengan bertindak sebagai regulator yang membangun kerangka hukum komprehensif dan berorientasi keadilan, dinamisor yang aktif menggerakkan dan mengoordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk sinergi program, fasilitator yang menyediakan infrastruktur dasar, akses bantuan, dan pendampingan sosial-ekonomi, serta katalisator yang memanfaatkan momentum bencana untuk mempercepat transformasi kebijakan dan membangun ketahanan jangka panjang melalui inovasi seperti Tim Tangguh Bencana dan integrasi pendidikan kebencanaan, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antarinstansi, kecepatan distribusi bantuan, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.

6.2 Saran

1. Perkuat Integrasi Data dan Koordinasi Lintas Sektor Membangun sistem data terpadu yang dapat diakses secara real-time oleh semua instansi terkait untuk menghindari tumpang tindih, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mempercepat pengambilan keputusan kolaboratif.
2. Tingkatkan Pendampingan Berkelanjutan dan Pelibatan Masyarakat Program pemulihan harus fokus tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada

pendampingan sosial-ekonomi jangka panjang pascarelokasi dan secara aktif melibatkan masyarakat serta tokoh lokal dalam setiap tahapan untuk menjamin keberlanjutan.

3. Institusionalisasikan Program dan Inovasi untuk Ketangguhan Jangka Panjang
Mengintegrasikan inisiatif seperti Kampung Siaga Bencana, kurikulum kebencanaan, dan standar konstruksi tahan gempa ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD untuk memastikan semua upaya pemulihan berorientasi pada pembangunan kota yang lebih tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul haris ahmadi. (2023). *Kepemimpinan Kolaboratif pada tanggap darurat bencana*. Deepublish Digital.
- Ajhari, A. A., Sitorus, K. J., Lyrawati, D. P. N., Sridana, E. F. S., Lestari, R., & Farida, W. V. (2023). NOAA IMAGE CLASSIFICATION USING GOOGLE'S TEACHABLE MACHINE. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 7(1). <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v7i1.6244>
- Bappenas. (2006). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009*.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rencana+Aksi+Nasional+Pengurangan+Risiko+Bencana+2006-2009&btnG=
- BMPB. (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*.
- Bouckaert, G. (2022). *Governance in a Post-Pandemic World*. Oxford University Press.
- Chen, Y., Ning, R., Yang, T., Feng, S., & Yang, C. (2018). Is transformational leadership always good for employee task performance? Examining curvilinear and moderated relationships. *Frontiers of Business Research in China*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s11782-018-0044-8>
- Criestian. (2004). Pemerintah. [wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah)
- Fadhilah, R., Saepudin, E. A., Alfiah, O., Dwiantoro, S., & Syahid, M. (2025). *Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Studi Kasus di Indonesia*.
- Gabor, D., & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: International development in the fintech era. *New Political Economy*, 22(4), 423–436. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298>
- Handayani, P., Astaivada, T., Aisyah, N., & Anshori, M. I. (2023). *Kepemimpinan Transformasional*.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). *penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash*.

- Marlen Novita Makalew. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *JURNAL GOVERNANCE, Vol.1, No. 1, 2021*.
file:///Users/macbook/Downloads/alfonkimbal,+Marlen+Makalew.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector* (4 ed.). Addison-Wesley.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis—Into the Age of Austerity*. Oxford University Press.
- Putra, A., Juwita, R., Alfiandi, R., Arnita, Y., & Iqbal, M. (2023). peran dan kepemimpinan perawat dalam manajemen bencana pada fase tanggap darurat. 1.
- Rahmanto, A. N., Naini, A. M. I., Priliantini, A., Hendriyani, C. T., & Anshori, M. (2022). krisis dan komunikasi kepemimpinan : analisis framing media sosial ganjar pranowo pada masa pandemi covid-19.
- Rusandi M. Muhammad Rusli. (2021). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan*.
- Rustanti. (2024). disaster management leadership dan intrinsic motivation menuju peningkatan kinerja sdm badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kotawaringin barat.
- Safitri, L., Saleh, K., Salmitha, L., & Maulida, N. (2025). *12 Multidisciplinary Approaches to Research in Economics, Vol 1, No 1, April 2025*.
- selamet muchsin. (2017). implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (*Studi pada Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014 di Jawa Timur*).
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan.
- Suciati, S. (2020). pendidikan bahasa dan sastra indonesia fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah surakarta.
- Suwandi, S. (2023). manajemen krisis terkini: strategi adaptif dalam menghadapi bencana dan tantangan mendadak. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 473.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3490>

Undari Sulung. (2024). *Volume 5, Nomor 3, September 2024. 5.*

Wahyuningroem, S. L., & Fitriyah, I. (2024). A Policy Study on Disability Inclusivity in National Disaster Management. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i1.3650>

Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

Wulan Mahardhika Gerungan. (2007). penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
file:///Users/macbook/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+10.+Wulan+Mahardhika+Gerungan_humas.pdf

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Tabel Jadwal Penelitian

[illegible]

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN DALAM
RANGKA PENYELESAIAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
TADULAKO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang **“Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likueifaksi Di Sulawesi Tengah”**

a. Regulator

1. Bagaimana Pemerintah Kota Palu merumuskan dan menetapkan peraturan daerah atau kebijakan khusus sebagai landasan hukum penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi?
2. Sejauh mana regulasi yang diterbitkan Pemkot Palu menjamin ketertiban distribusi bantuan dan mencegah penyelewengan sumber daya pascabencana?
3. Apa mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan Pemkot Palu terhadap pelanggaran prosedur penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi?
4. Bagaimana Pemkot Palu mengintegrasikan peraturan nasional (seperti UU Penanggulangan Bencana) dengan kebijakan lokal dalam penanganan pascabencana?
5. Apakah Pemkot Palu telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk mitigasi risiko bencana serupa di masa depan berdasarkan evaluasi pascabencana 2018?

b. Dinamisor

1. Strategi apa yang digunakan Pemkot Palu untuk mengoptimalkan mobilisasi relawan, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat dalam fase tanggap darurat dan pemulihan?
 2. Bagaimana Pemkot Palu mendorong peran aktif kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, anak-anak) dalam proses rehabilitasi pascabencana?
 3. Upaya apa yang dilakukan Pemkot Palu untuk mempertahankan dinamika koordinasi antarlembaga (BPBD, dinas sosial, kesehatan) selama masa transisi dari tanggap darurat ke rekonstruksi?
 4. Sejauh mana Pemkot Palu memanfaatkan media lokal dan tokoh masyarakat untuk memobilisasi dukungan psikososial bagi korban bencana?
 5. Bagaimana Pemkot Palu mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan mendinamisasi UMKM dan sektor informal terdampak bencana?
- c. Fasilitator
1. Bagaimana efektivitas distribusi logistik (pangan, obat-obatan, tenda) oleh Pemkot Palu kepada pengungsi di lokasi terdampak berat likuifaksi (seperti Petobo dan Balaroa)?
 2. Apa bentuk fasilitasi Pemkot Palu dalam menyediakan layanan kesehatan mental dan trauma healing bagi penyintas pascabencana?
 3. Bagaimana Pemkot Palu memfasilitasi akses pendidikan darurat dan pemulihan infrastruktur sekolah di wilayah terisolasi pascatsunami?

4. Apakah Pemkot Palu menyediakan bantuan teknis dan administratif untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP) yang hilang akibat bencana?
5. Sejauh mana fasilitasi Pemkot Palu dalam pembangunan hunian sementara (huntara) memenuhi standar layak huni dan lokasi aman dari risiko lanjutan?

d. Katalisator

1. Inovasi apa yang diinisiasi Pemkot Palu sebagai katalis dalam membangun sistem peringatan dini tsunami dan likuifaksi berbasis kearifan lokal pascabencana 2018?
2. Bagaimana Pemkot Palu mengkatalisasi pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana (KSB) di tingkat kelurahan sebagai bentuk kesiapsiagaan berkelanjutan?
3. Sejauh mana Pemkot Palu bertindak sebagai katalisator kolaborasi riset kebencanaan antara akademisi (untad), NGO, dan instansi teknis (PVMBG)?
4. Apakah Pemkot Palu telah mendorong transformasi tata ruang berbasis mitigasi bencana melalui revisi RDTRK sebagai dampak pembelajaran pascalikuifaksi?
5. Bagaimana peran katalis Pemkot Palu dalam mempercepat adopsi teknologi ramah gempa (seperti rumah tahan gempa) pada program rekonstruksi permukiman?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN SKRIPSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi Di"

- 1) Regulator
 - a. Bagaimana Pemerintah Kota Palu merumuskan dan menetapkan peraturan daerah atau kebijakan khusus sebagai landasan hukum penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi?

Jawab : - Proses Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Khusus Harus Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penagulangan Bencana dan Peraturan Turunanya Serta Melibatkan Kajian Mendalam Terhadap Karakteristik Bencana dan kebutuhan Penanganan pasca bencana termasuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi Ada Beberapa tahap dalam merumuskan penanganan pasca bencana

1. Tahap perencanaan (Planing) Meliputi :

- Analisis Resiko dan Kebutuhan

Melakukan analisis Resiko bencana secara menyeluruh untuk memahami tingkat resiko dan kerentanan wilayah terhadap Gempa Bumi, Tsunami dan likuifaksi

- Perencanaan Kontingensi

Susun Rencana Kontingensi (Rencana Darurat) yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan

Memastikan Perda yang dirancang selaras dengan Undang – Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan Pemerintah (PP) yang relevan

2. Tahap Perumusan Kebijakan Meliputi :

- Pengembangan Draf Kebijakan

Kembangkan Draf perda atau Kebijakan Khusus yang mencakup berbagai Aspek Pasca Bencana seperti penentuan status keadaan darurat, pembentukan posko pengungsian, kebutuhan Logistik, Layanan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Rehabilitasi Infrastruktur

- Partisipasi Publik dan Stakeholder Libatkan Berbagai Pemangku kepentingan (Pemda, BNPB, BPBD, Dinas Terkait, masyarakat dan ahli dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan secara akurat dan tepat sasaran

- Pendanaan

Memperhatikan aspek pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pasca bencana termasuk alikasi anggaran dan sumber dana yang tersedia

3. Tahapan Penetapan

- Pembahasan dan persetujuan

Kebijakan khusus penanganan Bencana dibahas oleh Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah

- Pengesahan

Setelah di setuju, kebijakan tersebut disahkan menjadi perda atau peraturan daerah yang mengikat Secara Hukum.

4. Tahapan Implementasi dan Evaluasi Meliputi :

- Pelaksanaan Operasional

Implementasi kebijakan yang telah disahkan yang meliputi berbagai kegiatan penanganan pasca bencana

- Pengawasan dan Evaluasi

Melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Evaluasi harus mengacu pada hasil analisis resiko dan dinamika terbaru dari situasi pasca bencana. Penerapan di tingkat lapangan menyangkut perda tentang mitigasi bencana yang memuat tentang ketentuan bangunan tahan gempa, penataan ruang wilayah serta sistem pering atau dini Peraturan kepada daerah tentang penanggulangan Bencana Mengatur secara rinci tahapan penanganan pasca bencana , mulai dari tanggap darurat, pemulihan, hingga Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b. Sejauh mana regulasi yang diterbitkan Pemkot Palu menjamin ketertiban distribusi bantuan dan mencegah penyelewengan sumber daya pascabencana?

Jawab : Regulasi yang di terbitkan menjadi Ketertiban distribusi

Bantuan Berdasarkan :

1. Prinsip manajemen Bencana

Pada prinsipnya manajemen bencana merujuk pada Undang – Undang No.24 Tahun 2007 yang mengamanatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di seluruh tahapan termasuk pasca bencana

2. Peran BPBD

BPBD bertindak sebagai pengarah dan koordinator penanggulangan bencana yang operasioalnya menyusun rencana penanggulangan bencana daerah untuk menjadi acuan bagi semua institusi terkait.

3. Tahapan Pasca Bencana

Regulasi secara spesifik mengatur tahapan rehabilitasi dan rekonsruksi termasuk perbaikan lingkungan, infratraktur dan rekonstruksi pemberian

Bantuan rumah, pemulihan sosial dan ekonomi yang semuanya membutuhkan distribusi bantuan yang teratur dan tepat sasaran.

4. Koordinasi Pelaku

Regulasi juga mendorong Partisipasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat swasta serta lembaga no pemerintah sehingga pendistribusian bantuan dapat lebih efisien dan efektif

- Keterkaitan regulasi dalam mencegah penyelewengan sumber daya dalam penanganan bencana memperhatikan hal hal di antaranya :

Sesuai dengan PP No.22 Tahun 2008 secara khusus mengatur pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang menetapkan mekanisme dan akutabilitas penggunaan dana untuk meminimalkan penyalagunaan

- Pengawasan dan Audit

Adanya pedoman peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah pada tanggap darurat yang dikeluarkan BPBD bertujuan untuk mengatur administrasi koordinasi dan pengawasan termasuk keluar masuknya bantuan barang dan personil yang penting untuk mengawasi prosesx dan mencegah penyelewengan.

- Mekanisme Pelaporan dan Akuntabilitas

Dengan adanya kerangka hukum dan pedoman operasional yang jelas lembaga-lembaga yang terlibat memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan bantuan dan harus dapat mempertanggung jawabkan setiap sumber daya yang di kelola.

- Prinsip Kemanfaatan dan Efektifitas

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berdasarkan pada prinsip kemanfaatan dan efektifitas yang berarti segala bantuan yang disalurkan harus benar-benar dapat di rasakan oleh korban bencana dan digunakan sesuai tujuannya.

- c. Apa mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan Pemkot Palu terhadap pelanggaran prosedur penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi?

Jawab : Dasar Hukum yang digunakan dalam pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Undang Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi landasan hukum utama yang mengatur prinsip prinsip penanggulangan bencana termasuk aspek pengawasan, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas.

- Verifikasi Dokumen dan Kearsipan

Pemerintah daerah wajib menyertakan detail *Engineering Design(DED)* yang sesuai dengan hasil verifikasi lapangan oleh BPBD untuk setiap usulan kegiatan memastikan kesiapan dan kelengkapan data sebelum dana hibah diberikan

- Koordinasi dan Keterpaduan

Pengawasan melibatkan koordinasi antar lembaga terkait seperti BPBD, BASNAS, BMKG dengan bantuan teknis dari opd terkait untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan kegiatan harus di dasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencagah penyelewengan dana dan memastikan penggunaan sesuai tujuan yangt di tetapkan

- Pemantauan dan Pelaporan

Pengawasan juga mencakup pemantauan terhadap penggunaan dana hibah dan pelaporan berkala oleh pelaksana kegiatan kepada lembaga pengawas

Sanksi Terhadap Pelanggaran

Pelanggaran prosedur dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menimbulkan sangsi antara lain :

- a. Sangsi Administrasi

Pembekuan atau penundaan pencairan dana hibah hinggh seluruh persyaratan terpenuhi atau pelanggaran diperbaiki

- b. Sangsi Hukum

Sangsi Hukum pidana atau perdata jika terdapat indikasi penyalagunaan wewenang korupsi atau kerugian negara dalam pengelolaan dana hibah

c. Pembatalan Kegiatan

Keputusan untuk membatalkan kegiatan atau proyek yang tidak sesuai prosedur atau di temukan pelanggaran serius menjadi landasan hukum utama yang mengatur prinsip prinsip penanggulangan bencana termasuk aspek pengawasan, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas.

d. Bagaimana Pemkot Palu mengintegrasikan peraturan nasional (seperti UU Penanggulangan Bencana) dengan kebijakan lokal dalam penanganan pascabencana?

Jawab : - Untuk Mengintegrasikan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 (Undang-Undang Penanggulangan Bencana) dengan kebijakan lokal atau daerah, pemerintah daerah harus mengutamakan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) mengembangkan dan memperkuat kelembagaan BPBD, menyusun regulasi daerah yang mendukung penanggulangan bencana, menyediakan anggaran yang mendukung penanggulangan bencana, menyediakan anggaran yang memadai melalui APBD, membangun infrastruktur dan sistim peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta melakukan kolaborasi pentahelix ditingkat daerah.

e. Apakah Pemkot Palu telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk mitigasi risiko bencana serupa di masa depan berdasarkan evaluasi pascabencana 2018?

Jawab : - Ya telah menyusun SOP kebencanaan SOP Kebencanaan Meliputi :

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya

- Penentuan status keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan terhadap kelompok rentan
- Pemenuhan dengan segera prasarana dan sarana vital

2) **Dinamisator**

- a. strategi apa yang digunakan Pemkot Palu untuk mengoptimalkan mobilisasi relawan, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat dalam fase tanggap darurat dan pemulihan?

Jawab : Strategi yang digunakan pada fase tanggap darurat

- Koordinasi dan Komando Terpusat

Membangun sistem komando bencana yang terintegrasi untuk mengkoordinasikan semua elemen yang terlihat termasuk relawan TNI / POLRI dan Organisasi masyarakat agar tindakan berjalan seragam dan tidak tumpang tindih

- Penyelamatan dan Evakuasi

Prioritaskan upaya penyelamatan korban dan evakuasi masyarakat setempat yang aman dengan dukungan penuh dari TNI / POLRI dan Relawan Terlatih

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Fokus pada penyediaan bantuan darurat seperti pangan, sandang papan, air bersih dan layanan kesehatan bagi para korban

- Penilaian Cepat (Rapid Assesment)

Melakukan penilaian untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kerugian dan kebutuhan mendesak di lokasi bencana

- Mobilisasi Sumber Daya

Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya (LOGISTIK, Tenaga Secara Efisien dan Menghindari Duplikasi Upaya Strategi Pada Fase Pemulihan :

- Pelibatan Masyarakat Aktif

Mendorong dan memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti memperbaiki rumah dan infrastruktur

- Koordinasi Lintas Sektor

Memastikan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPBD organisasi masyarakat dan lembaga yang terkait untuk menjelaskan program pemulihan

- Dukungan Psikososial

Memberikan dukungan psikososial dan sosial kepada korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kembali beraktifitas

- Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencarian

Merancang program untuk memulihkan mata pencarian masyarakat dan mendukung penguatan ekonomi daerah yang terdampak bencana

- Peningkatan Kapasitas

Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi relawan dan masyarakat untuk menghadapi bencana di masa mendatang membangun ketahanan bencana di wilayah yang terdampak seperti : mengadakan simulasi kebencanaan, pelatihan teknis bagi relawan dll.

- b. Bagairnana Pemkot Palu mendorong peran aktif kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, anak-anak) dalam proses rehabilitasi pasca bencana?

Jawab : - Perlu dilakukan identifikasi dan pendataan terhadap kelompok rentan (lansia, anak-anak, penyandang disabilitas) sejak bencana terjadi. Data ini penting untuk perencanaan kebutuhan evakuasi, penempatan di pengungsian serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

- Perencanaan dan Pelaksanaan Yang Inklusif Melibatkan perwakilan kelompok rentan (Penyandang

Disabilitas, Lansia, Perempuan Dalam Rencana Kontinjensi dan Pelatihan Kebencanaan, memastikan adanya fasilitas khusus di tempat wvakuasi seperti ruang menyusui, fasilitas difabel dan sistim keamanan untuk melindungi perempuan dan anak serta tersedianya dukungan psikososial dan kegiatan yang suportif bagi korban terutama anak anak untuk mengatasi trauma.

- Edukasi dan Pemberdayaan

Memberikan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan yang mudah dipahami oleh kelompok rentan menggunakan metode yang ramah seperti visualisasi dan bahasa isyarat fasilitas pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan kreatif mendukung usaha kecil atau membangun pasar pasar lokal serta memperkuat kemandirian pangan dan nutrisi melalui kegiatan seperti smart

farming atau sistim pengolahan pangan lokal terpadu yang melibatkan komunitas

- Pendampingan dan Dukungan Yang Berkelanjutan Melalui Sosialisasi, penyuluhan dan training yang vfokus pada penguatan kapasitas kelompok rentan, memastikan kebutuhan dasar seperti tenda, makanan, perlengkapan bayi dan kebutuhan kesehatan terpenuhi menekankan bahwa partisipasi berkelanjutan pemulihan tergantung pada penyesuaian tugas dan pemenuhan kebutuhan mereka sersuai dengan kapasitas masing masing
- Koordinasi Lintas Sektor

Menjalin kerja sama yang kuat antara pemerintah, lsm, relawan dan masyarakat untuk memastikan fokus pada inklusivitas san perlindungan hak hak kelompok renta serta peran pemerintah agar dapat mencukupi penyediaan modal, pendampingan dan pembuatan regulasi yangmendukung proses regenerasi komunitas pasca bencana.

- c. upaya apa yang dilakukan Pemkot Palu untuk mempertahankan dinamika koordinasi antarlembaga (BPBD, dinas sosial, Kesehatan selamarnasa transisi dari langgap darurat ke rekonstruksi?

Jawab : - Upaya-Upaya yang dapat dilakukan :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Pasca Bencana Menyusun perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan pada penaganan pasca bencana yang memuat strategi rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang untuk mengembalikan kondisi pasca bencana seperti semula mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana dari berbagai lembaga agar dapat kesamaan tujuan dan langkah dalam fase pemulihan

2. Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi

Koordinasi terus menerus, menjaga jalur komunikasi yang aktif antara BPBD sebagai Koordinator dinsos dan dinas kesehatan untuk berbagai informasi, data dan sumber daya secara berkala, membentuk forum rutin pasca bencana untuk membahas kendala dan mencari solusi bersama dalam fase pemulihan.

3. Pemahaman Peran dan Fungsi Lembaga

Pengelolaan peran masing masing untuk memastikan setiap lembaga (BPBD, DINSOS, DINKES) memahami peran dan tanggung jawabnya secara spesifik dalam fase rehabilitasi danm rekonstruksi untuk menghindari tumpah tindih dan menciptakan efisiensi. Mendorong partisipasi aktif dari semua kalangan termasuk pentahelix (pemerintah, masyarakat akademisi, dunia usaha dan media untuk pelaksanaan penanggulangan bencana

4. Penyediaan sumber daya

Mengalang bantuan tenaga dan sumber daya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pembersihan lingkungan perbaikan rumah dan fasilitas umum Pemenuhan kebutuhan korban dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban tidak hanya pada saat tanggap darurat tetapi juga dalam proses pemulihan fisik dan mental pada fase rehabilitasi.

d. Sejauh mana Pemkot Palu memanfaatkan media lokal dan tokoh masyarakat untuk memobilisasi dukungan psikososial bagi korban bencana?

Jawab : Menyebarkan informasi dan layanan sedangkan tokoh masyarakat bertindak sebagai fasilitator dukungan emosional dan keagamaan melalui kelompok dukungan, aktifitas sosial dan kegiatan keagamaan. Kolaborasi antara keduanya memastikan jangkauan yang luas dan kepercayaan yang mendalam

dalam upaya pemulihan psikologis korban.

- e. Bagaimana Pemkot Palu mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan mendinamisasi UMKM dan sektor informal terdampak bencana?

Jawab : Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan mendinamisasi UMKM dan sektor formal pasca bencana, pemerintah perlu meningkatkan akses modal dan pelatihan mendorong digitalisasi dan akses pasar membangun infrastruktur digital dan fisik yang mendukung serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Sektor informal yang besar di Indonesia perlu juga di dorong untuk bertransformasi ke sektor formal dengan kemudahan regulasi, serta UMKM harus di dukung untuk membuat ketahanan pasca bencana.

3) Fasilitator

- a. Bagaimana efektivitas distribusi logistik (pangan, obat-obatan, tenda) oleh Pemkot Palu kepada pengungsi di lokasi terdampak berat likuifaksi (seperti Petobo dan Balaroa)? Jawab : Efektivitas distribusi logistik (Pangan, Obat-Obatan, Tenda) kepada pengungsi di lokasi likuifaksi berat sangat bergantung pada kesiapan awal, koordinasi yang kuat , adaptasi terhadap kondisi medan yang sulit dan mekanisme pemantauan yang responsif, kunci utamanya adalah memiliki rencana tanggap darurat yang jelas, memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang serta melakukan penilaian resiko dan pemetaan kebutuhan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan penyaluran logistik yang krusial bagi korban bencana.
- b. Apa bentuk fasilitasi Pemkot Palu dalam menyediakan layanan kesehatan mental

dan trauma healing bagi penyintas pascabencana? Jawab : Fasilitas layanan kesehatan mental dan trauma healing pasca bencana meliputi dukungan psikososial melalui konseling individu dan kelompok intervensi krisis, serta aktivitas rekreatif seperti bermain dan menggambar untuk anak-anak yang semuanya bertujuan untuk stabilisasi emosional, penanganan trauma, dan pemulihan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan

Bentuk-Bentuk Fasilitas Yang Dapat Disediakan :

- Dukungan Psikososial dan Konseling
Dukungan emosional memberikan pendampingan untuk membantu penyintas mengatasi emosi negatif seperti rasa takut, sedih dan marah. Melalui Konseling Individu atau Kelompok Bentuk praktis dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan memecahkan masalah praktis seperti mencari keluarga yang hilang atau mendapatkan makanan dan air. Pembinaan mental berupa bimbingan dan penguatan mental psikologis untuk mencegah kejenuhan dan mengelola stres pasca bencana.
- Intervensi Trauma Healing dan Psikoedukasi
Intervensi krisis diberikan untuk dukungan dan bantuan awal kepada individu yang mengalami dampak langsung dari peristiwa traumatis. Psikoedukasi berupa informasi tentang reaksi stres yang umum terjadi pasca bencana dan mengajarkan strategi dasar untuk mengatasi stres. Aktivitas rekreatif dan ekspresif berupa mengadakan permainan interaktif, menggambar, bernyanyi, dan bercerita untuk membantu penyintas trauma anak-anak, mengekspresikan perasaan dan mengurangi trauma.
- Penguatan Masyarakat dan Kolaborasi

Memperkuat jaringan dukungan dan menghubungkan penyintas dengan keluarga teman atau jaringan komunitas untuk mengurangi rasa isolasi. Pelatihan relawan umum untuk memberikan pertolongan pertama psikologis sebagai bagian dari upaya penjangkauan lebih luas. Koordinasi lintas lembaga dengan membangun kolaborasi antara pemerintah psikolog, lsm, dan relawan untuk memastikan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan

- Fasilitasi dan lingkungan yang mendukung Menyediakan lingkungan yang aman dan tenang baik secara fisik maupun emosional untuk memungkinkan penyintas merasa nyaman dan aman. Menyediakan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang bagi anak-anak dan penyintas lain seperti permainan atau kegiatan belajar sambil bermain.
- c. Bagaimana Pemkot Palu memfasilitasi akses pendidikan darurat dan pemulihan infrastruktur sekolah di wilayah terisolasi pasca tsunami? Jawab : -
 - diperlukan kerja sama lintas sektor, pembangunan sekolah darurat yang fleksibel, penyediaan layanan dasar bagi siswa, dukungan psikososial, serta pendampingan dan pelatihan bagi guru dan staf sekolah sesuai prinsip sekolah/ madrasah aman bencana untuk memfasilitasi akses pendidikan darurat diperlukan :
 - Perencanaan dan kerja sama
 - Kerja sama lintas sektor melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis. Pedoman pendidikan darurat digunakan sebagai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat yang disusun oleh kementerian pendidikan sebagai acuan utama dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Kaji dan dayagunakan kearifan lokal yang ada di masyarakat untuk mendukung upaya

pemulihan.

- Penyediaan Akses dan Pendidikan Darurat

Bangun dan fasilitas sekolah darurat meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai tempat belajar aman dan stabil bagi anak. Pastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makan dan minum sebelum penyelenggaraan kegiatan pendidikan, permudah proses administrasi bagi siswa yang ingin pindah sekolah baik sementara maupun permanen dengan mengutamakan hak anak untuk tetap belajar. Pemanfaatan tenaga relawan yang terpilih untuk membantu kekurangan guru yang ada.

- Pemulihan Infrastruktur Sekolah

Lakukan perbaikan dan rekonstruksi bangunan sekolah yang rusak parah agar dapat berfungsi kembali dan tempat belajar yang aman.

- Dukungan Psikososial dan pembelajaran

Berikan rasa normal dan kestabilan melalui pendidikan untuk meringankan dampak psikologis bencana pada anak, sampaikan pesan-pesan penting tentang resiko dan tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana melalui kegiatan pendidikan, pemberian pelatihan kepada guru dan staf sekolah.

- Prinsip Sekolah Aman Bencana

Pastikan pemenuhan hak anak dalam pendidikan termasuk hak untuk tumbuh kembang dan partisipasi aktif. Berikan perhatian khusus pada penyediaan akses fisik dan non fisik yang inklusif untuk anak berkebutuhan khusus agar tidak tertinggal. Apakah Pemkot Palu menyediakan bantuan teknis dan administratif untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP)

yang hilang akibat bencana? Jawab : Ya Pemkot melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) menyediakan layanan bantuan teknis dan administrasi kependudukan bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan ktp dan kk yang hilang akibat bencana, layanan ini meliputi jemput bola kelokasi bencana/pengungsian, proses yang dipercepat tidak memerlukan dokumen lain seperti ktp, kk asli yang hilang dan gratis untuk warga terdampak bencana ada dua cara utama untuk mengurus dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana

- melalui layanan jemput bola dinas dukcapil akan mendatangi langsung lokasi bencana atau tempat pengungsi untuk memberikan layanan pengurusan dokumen
- datang langsung ke kantor dukcapil
- Bisa datang langsung ke kantor dukcapil di wilayah tempat tinggal anda untuk mengurus dokumen pengganti
- Fasilitas diberikan : gratis, tempat syarat dokumen lain, prosedur sederhana

d. sejauh mana fasilitasi Pemkot Palu dalam pembangunan hunian sementara (huntara) memenuhi standar layak huni dan lokasi aman dari risiko lanjutan?

Jawab : - fasilitas pembangunan hunian sementara (huntara) yang memenuhi standar layak huni dan lokasi aman akan bergantung pada pedoman dan standar yang berlaku seperti standar minimal ukuran perorang persyaratkan kesehatan dan keamanan, kemudahan akses fasilitas umum serta jaminan privasi, namun perlu ditegaskan bahwa konsep huntara memang bertujuan sebagai solusi darurat dan bukan rumah permanen

Aspek pembangunan hunian sementara (huntara)

- aspek kelayakan hunian

- ukuran standar minimal perorang seperti 3 meter persegi perorang harus dienuhi, agar penghuni memiliki ruang gerak yang cukup, huntara harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang cukup, ventilasi yang baik, perlindungan dari cuaca dan material yang tidak berbahaya lokasi huntara sebaiknya mudah di akses oleh fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi dan p[usat layanan darurat lainnya, huntara harus dirancang untuk menjamin privasi antar jenis kelamin. Dan kelompok usia yang berbeda seperti dengan memisahkan area untuk laki laki dan perempuan

- aspek keamanan lokasi

lokasi huntara harus di pilih berdasarkan penilaian resiko bencana yang akurat, menjauhkan penghuni dari area rawan bencana, pembangunan huntara tidak boleh berada dilokasi yang berpotensi terjadi longsor, banjir atau resiko lanjutan lainnya Pemerintah atau lembaga yang terkait seperti BPBD perlu memberikan bantuan teknis dan panduan dalam menentukan lokasi yang aman dan pembangunan huntara yang sesuai standar Tantangan dan solusi Dalam pembangunan huntap perlu memperhatikan

- Keterbatasan waktu

Dalam situasi darurat, kecepatan pembangunan huntara sangat penting sehingga pewnggunaan material prefabrikasi atau partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dapat mempercepat peroses konstruksi

- Kebutuhan jangka panjang

Meskipun huntara adalah solusi sementara penting untuk memastikan bahwa proses perpindahan ke hunian permanen yang lebih layak huni juga terncana dengan baik

- Ketertiban masyarakat

Partisipasi masyarakat termasuk penyintas bencana dalam prosers perencanaan dan pembangunan huntera dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kolaborasi kumunal

4) Katalisator

- Inovasi apa yang diinisiasi Pemkot Palu sebagai katalis dalam membangun sistem peringatan dini tsunami dan likuifaksi berbasis kearifan lokal pascabencana 2018? Jawab : - Inovasi katalis yang di inisiasi untuk membangun sistim peringatan dini :
 - Integritas kearifan lokal dengan teknologi modern
 - Penggunaan smong (contoh dari simeule) sistim peringatan dini berbasis masyarakat (early warning people sistim) yang mengandalkan pengetahuan kolektif tentang tanda tanda alam yang mengindikasikan tsunami ini di perkuat dengan teknologi.
 - Pengenalan tanda tanda alam mengoptimalkan pengetahuan turun temurun tentang tanda tanda alam, yang mendahului bencana seperti gempa bumi atau perubahan perilaku laut
 - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI)
 - Prediksi kejadian tsunami antara lain dapat di gunakan untuk memperidiksi dan memproses data kejadian tsunami, membantu mengeluarkan peringatan dini dengan lebih cepat dan akurat

- Sistim prediksi teknologi AI membantu dalam sistim prediksi kejadian tsunami yang merupakan elemen kunci untuk memperkuat strategi mitigasi
- Penerapan internet of things (Iot)
- Pemantauan real time menggunakan sensor Iot untuk mengumpulkan data tentang ketinggian air, pergerakan tanah atau aktifitas gempa bumi secara real time
- Sistim alarm data sensor IOT dapat memicu sistim alarm otomatis dan memberikan peringatan dini berbasis resiko kepada masyarakat langsung
- Sistim peringatan yang disesuaikan dengan komunitas
- Pesan yang mudah di pahami mengembangkan penyebaran informasi peringatan dini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan
- masyarakat termasuk yang tidak memiliki akses digital
- Platform multi bahasa sistim peringatan dini multi ancaman berbasis komunitas dirancang untuk mencakup berbagai jenis bencana termasuk gempa bumi, banjir dan longsor
- Kolaborasi antar lembaga dan komunitas
- Kerja sama untuk penguatan sistim mengigit banyak inovasi seperti yang di usulkan BPPT dan BMKG, kolaborasi antar lembaga pemerintah dan komunitas sangat penting untuk membangun sistim yang terintegrasi
- Inklusi masyarakat dalam proses mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam pengembangan dan implementasi sistim peringatan dini untuk meningkatkan efektifitasnya.

- b. Bagaimana Pemkot Palu mengkatalisasi pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana (KSB) di tingkat kelurahan sebagai bentuk kesiapsiagaan berkelanjutan? Jawab :- Untuk mengkatalisasi pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana (KSB) di tingkat kelurahan adalah :

Melakukan sosialisasi dan edukasi bencana, identifikasi potensi dan partisipasi masyarakat, latih anggota KSB, bentuk tim dan bagikan tugas (seperti evakuasi, dapur umum dll), simulasikan prosedur kesiapsiagaan, bangun sinergi dengan pemerintah dan lembaga terkait dokumentasikan dan evaluasi kegiatan secara berkala serta fasilitasi pengadaan lumbung sosial dan peralatan darurat.

- Penyuluhan dan sosialisasi di lakukan kegiatan edukasi tentang resiko bencana di wilayah kelurahan dan pentingnya kesiapsiagaan komunitas melalui pertemuan warga, papan informasi dan materi penyuluhan tentang kesiapsiagaan
- Tujuan KSB (kampung Siaga Bencana) di jelaskan untuk membangun kapasitas masyarakat mengorganisasi potensi lokal, menguramngi dampak bencana dan menumbuhkan budaya siaga bencana serta solidaritas sosial
- Identifikasi potensi dan partisipasi masyarakat
- Melibatkan pemangku kepentingan, libatkan perangkat kelurahan tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat untuk mewndukung dan mendorong pembentukan ksb
- Rekrutmen sukarelawan dari masyarakat sekitar yang memiliki antusiasme dan kepedulian terhadap bencana untuk menjadi anggota ksb (kampung siaga bencana)
- Pelatihan Anggota KSB

- Pelatihan teknis diberikan dan pembengkalan materi kebencanaan seperti pertolongan pertama evakuasi dan tanggap darurat yang di fasilitasi dinsos atau lembaga terkait
- Bagi sukarelawan dapat membagi beberapa tim dengan tugaskhusus seperti tim evakuasi, tim dapur umum, tim logistik dan tim kesiapsiagaan lainnya
- Simulasi dan uji coba prosedur operasional standar (POS)
- Simulasi evakuasi dilakukan sekitar lingkungan kelurahan
- Melakukan pengujian dan simulasi prosedur operasi standar ((POS) KSB (Kampung Siaga Bencana) secara berkala untuk mewmastikan kesiapan anggota dalam bertindak
- Pengembangan kapasitas dan sinergi
- Sistim peringatan dini di kembangkan agar dapat di gunakan di kelurahan untuk memberikan informasi dan peringatan kepada warga
- Kolaborasi lintas sektor dibangun dengan dinsos, BPBD, DINKES, Pendidikan, Tim Sar dan Relawan seperti TAGANA untuk mendukung kegiatan KSB
- Penguatan kelembagaan KSB (kampung siaga bencana)
- Pengukuhan ksb (Kampung Siaga Bencana) dilakukukan bagi anggota ksb yang telah dilatih untuk memberikan penguatan dan komitmen
- Pengelolaan lumbung sosial selain membentuk tim, masyarakat juga perlu membangun lumbung sosial yangt berisi kebutuhan logistik untuk situasi darurat
- Pemantauan dan evakuasi berkelanjutan
- Evakuasi rutin dilakukan pada kegiatan ksb secara berkala untuk mengidentifikasi

kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan

- Peningkatan kapasitas terus di tingkatkan dan kesiapan anggota ksb agar mereka mampu menjaga kelangsungan kesiapsiagaan di kelurahan
- c. Sejauh rmana Pemkot Palu bertindak sebagai katalisator kolaborasi riset kebencanaan antara akademisi (untad), NGO, dan instansi teknis (PVMBG)? Jawab :- Pentingnya kolaborasi penthalix terletak pada kemampuan untuk menyatukan beragam perspektif dan keahlian guna memecahkan masalah yang kompleks, meningkatkan produktifitas, inovasi, dan efisiensi kerja, kolaborasi juga membangun hubungan yang kuat antar anggota tim, menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong pengembangan diri serta pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif

Dengan kolaborasi mendapatkan :

- Peningkatan produktifitas lebih cepat
- Penyelesaian tugas lebih cepat dengan mengabungkan keahlian dan pengetahuan yang berbeda, tim dapat menyelesaikan tugas dan proyek yang sulit dapat di kerja dengan lebih cepat dan efisien
- Mengurangi miskomunikasi memungkinkan tim untuk saling membantu sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan efektifitas kerja secara keseluruhan
- Inovasi dan pemecah masalah
- Beragam perspektif bekerja sama dengan orang orang yang memiliki gaya kerja, budaya dan latar belakang yang beragam menghasilkan berbagai ide dan solusi inovatif untuk masalah kompleks`

- Pemikiran kreatif memicu kreatifitas dan memungkinkan tim untuk menemukan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan yang penting untuk pertumbuhan dan berkelanjutan suatu organisasi.
 - Membangun budaya kerja positif
 - Hubungan antara karyawan dapat mempercepat hubungan antar anggota tim, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati serta membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan positif
 - Motivasi dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan etos kerja dan memberikan rasa pencapaian bersama sehingga membuat pekerjaan lebih menyenangkan dan bermakna
 - Pengembangan diri dan tim
 - Anggota dapat saling belajar dan mentransfer pengetahuan serta keterampilan yang berkontribusi pada pengembangan profesional setiap individu dan keseluruhan tim
 - Keterlibatan dalam kolaborasi yang efektif dapat membantu membangun reputasi sebagai individu yang mampu bekerja sama dan mencapai hasil, serta merasa lebih baik karena pelepasan endorfin positif.
- merupakan langkah strategi yang tepat langkah ini memungkinkan pemerintah untuk memperbarui rencana tata ruang berdasarkan pembelajaran dari bencana. Seperti likuifaksi untuk mengurangi resiko bencana di masa depan, meminimalkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, serta memastikan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan
- Mengapa transformasi tata ruang berbasis mitigasi penting pasca bencana
- Pembelajaran dari bencana

Pengalaman pasca likuifaksi memberikan pelajaran berharga tentang kerentanan suatu wilayah, revisi RDTR memungkinkan penerapan pembelajaran ini dalam perencanaan pembangunan dimasa depan termasuk penentuan zona aman dan area yang harus di hindari

- Pengurangan resiko bencana (mitigasi)

Transformasi tata ruang yang berfokus pada mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi resiko dan dampak buruk bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam

- Peningkatan kesadaran dan pengetahuan

Proses revisi RDTR dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta pembuat kebijakan mengenai resiko bencana di lingkungan mereka

- Pedoman pembangunan yang tepat

RDTR yang di perbarui akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pengembangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di area yang berpotensi rawan bencana, termasuk melalui penggunaan konstruksi tahan bencana

Bagaimana mendorong Transformasi ini

- Melakukan analisis kerentanan dan resiko yang komprehensif mengkaji kembali data dan dampak dari lingkungan untuk mengidentifikasi zona zona yang paling rentan

- Menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) yang adaptif Merumuskan RDTR yang mencakup pengaturan penggunaan lahan, zonasi resiko bencana dan

persyaratan pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis dan bencana

- Melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan

Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal

- Menerapkan teknologi mitigasi bencana

Menggunakan teknologi seperti sistem pemantauan aplikasi peringatan dini dan kecerdasan buatan untuk memprediksi bencana dan mendukung respons yang lebih cepat dan efektif

- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan

Melalui pendidikan kesiapsiagaan bencana dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tindak mitigasi yang tepat

Transformasi tata ruang ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kota yang lebih aman, tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana dimasa depan. Bagaimana peran katalis Pemkot Palu dalam mempercepat adopsi teknologi rumah tahan gempa (seperti rumah tahan gempa) pada program rekonstruksi permukiman? Jawab :- untuk mempercepat.

adopsi teknologi rumah tahan gempa pada program rekonstruksi permukiman pemerintah perlu memberikan insentif finansial memperkuat edukasi dan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga konstruksi, menyediakan panduan dan dukungan teknis serta mengembangkan dan mempromosikan teknologi inovatif dan terjangkau selain itu kampanye kesadaran publik dan integrasi

dalam perencanaan kota juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana

Langka langka konkret untuk mempercepat adopsi teknologi rumah tahan gempa

- Kebijakan insentif pemerintah

- Insentif finansial

Memberikan subsidi pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan biaya konstruktif untuk membangun rumah tahan gempa guna mengurangi beban biaya bagi masyarakat dan pengembang

- Regulasi dan standar

Tetapkan dan perbarui regulasi serta standar konstruksi yang ketat terutama untuk daerah rawan gempa untuk memastikan semua bangunan baru memenuhi persyaratan tahan gempa

- Dukungan teknis

Sediakan dana dukungan teknis untuk program rekonstruksi termasuk untuk program retrofit (penguatan) bangunan lama yang sudah ada

- Edukasi dan pelatihan

- Pelatihan konstruksi

Penyelenggaraan pelatihan untuk arsitek, insinyur kontraktor dan tukang bangunan tentang teknik konstruksi tahan gempa terbaru dan penggunaan material yang tepat

- Edukasi material

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis jenis material bangunan yang efektif dan aman seperti beton bertulang, baja tahan gempa serta sistem isolasi seismik

- Pemeliharaan dan kesiapsiagaan

Ajarkan masyarakat cara memelihara rumah tahan gempa secara berkala dan lakukan simulasi serta latihan kesiapsiagaan bencana untuk persiapan menghadapi gempa bumi

- Inovasi teknologi dan material

- Promosikan teknologi inovatif

Kembangkan dan promosikan teknologi tahan gempa yang terjangkau seperti sistem risha (rumah instan sederhana sehat) yang modular di bangun dan efisien

- Penggunaan material modern

Dorong penggunaan material konstruksi yang lebih kuat, ringan dan fleksibel seperti beton bertulang serat baja, baja tahan gempa dan material komposit yang mampu menahan deformasi dan keretakan

- Teknologi isolasi seismik

Integrasikan teknologi isolasi seismik dengan memasang bantalan elastomer atau pegas di antara pondasi dan struktur atas bangunan untuk menyerap dan meredam energi gempa

- Kampanye kesadaran masyarakat

- Kampanye informasi

Lakukan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah tahan gempa dan peran serta tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keselamatan mereka

- Libatkan komunitas

Dorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan terhadap

gempa melalui preogram program yang melibatkan komunitas

- Integrasi perencanaan kota
- Perencanaan berkelanjutan

Integrasikan strategi tahan gempa dalam perencanaan kota secara keseluruhan, termasuk pemilihan lokasi bangunan yang tepat dan pengembangan infrastruktur publik yang di pertimbangkan aspek tahan gempa sebagai bagian integral dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MITIGASI BENCANA

1. Pra bencana

- Penyuluhan dan sosialisasi

Dinsos memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana di wilayah kerja serta bagaimana cara mengurangi resiko dan menyelamatkan diri jika terjadi bencana

- Peningkatan kapasitas masyarakat

Dinsos berperan dalam peningkatan kapasitas terhadap bencana termasuk melalui pelatihan, kesiapsiagaan, bencana dan pembentukan kampung siaga bencana (KSB)

- Penyediaan sarana dan prasarana

Dinsos memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang vdi butuhkan dalam penanggulangan bencana seperti logistik, tenda, peralatan, evakuasi dll.

2. Saat bencana

- Menyalurkan bantuan darurat

Dinsos berperan dalam penyaluran bantuan darurat kepada korban bencana termasuk makanan, air bersih, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya.

- Evakuasi dan penyelamatan
- Dinsos bersama relawan taruna siaga bencana (TAGANA) turut serta dalam upaya evakuasi dan penyelamatan korban bencana

- Penanganan Pengungsi

Dinsos mengelola tempat pengungsian dan memberikan pelayanan dasar bagi para pengungsi seperti makan, air bersih, tempat tinggal sementara dan layanan kesehatan

3. Pasca bencana

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dinsos Terlibat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang rusak akibat bencana serta pemulihan sarana dan prasarana umum

- Pemulihan Psikososial

Dinsos memberikan dukungan psikososial kepada para korban bencana untuk memulihkan mental dan emosional mereka

- Pemulihan Ekonomi

Dinsos membantru para korban bencana dalam memulihkan mata pencarian mereka misalnya melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha dan program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



1. IDENTITAS DIRI

Nama	: Akmal Mori Amrin
Tempat, Tanggal Lahir	: Sabilambo, 10 – 09 - 1993
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Alamat	: As. Korem Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu
No Hp	: 081245854095

2. NAMA ORANG TUA

Ayah	: Mori Amrin
Ibu	: Marwiah Lausu

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 2 Sabilambo, Selesai
SMP	: SMPN 3 Kolaka, Selesai
SMA	: SMKN 1 KOLAKA
SI	: FISIP/Universitas Tadulako, 2025-Selesai

Lampiran 5 : Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Soekarno Hatta, Kilometr. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untadfisip18@gmail.com_Laman : <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 3543/UN28.3/DT.00.00/2025
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 22 Juli 2025

Kepada Yth.
Wali Kota Palu

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Akmal Mori Amrin
Stambuk : B 401 22 155
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal : Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.
NIP.196810211992031001

Tembusan Yth :

1. Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Univ. Tadulako;
3. Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Tadulako;
4. Arsip.



SERTIFIKAT SNI ISO 9001:2015-CERTIFICATE NO. 1687



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Soekarno Hatta, Kilometr. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untadfisip18@gmail.com_Laman : <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 3543/UN28.3/DT.00.00/2025
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 22 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala BPBD Kota Palu

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Akmal Mori Amrin
Stambuk : B 401 22 155
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal : Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.


Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.
NIP.196810211992031001

Tembusan Yth :

1. Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Univ. Tadulako;
3. Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Tadulako;
4. Arsip.

Lampiran 6 Surat Balasan Meneliti

**PEMERINTAH KOTA PALU**
DINAS KESEHATAN
JLN. BALAIKOTA UTARA NO. 4 TELP. (0451) 425140 PALU

SURAT KETERANGAN
NOMOR 800.2.2.1/ 1815-216 /DINKES/2025


Surat keterangan ini diberikan kepada :

Nama	Atmal Mori Amrin
NIM	B40122155
Asal Institusi	Universitas Tadulako
Judul/ Data	Peran Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah.

Telah selesai melakukan studi pendahuluan berupa pengambilan data terkait
penyusunan tugas akhir/ Karya Tulis Ilmiah/ tesis.

Pemildan surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 8 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota


dr. Rachmat Muliya Moenawar
NIP. 196212031900604 1008



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Baruga No. 12 Telepon (0451) 411354

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 817/00.9.6.1/VIII/BPBD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Issa Sunusi, S.T.
Nip : 197912212008011012
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Menerangkan Bahwa :

1. Nama : **Akmal Mori Amrin**
Stambuk : B 401 22 155
Fakultas : Universitas Tadulako / Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi / Ilmu Pemerintahan
Judul : Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Pasca gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengan

Telah Menyelesaikan Kegiatan Pengambilan Data untuk salah satu persyaratan penyusunan tugas akhir, Program Studi Ilmu Ilmu Pemerintahan / Universitas Tadulako pada unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Sebagaimana bukti laporan kegiatan penelitian terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 27 Agustus 2025

a.n. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALU
SEKRETARIS



MOHAMMAD ISSA SUNUSI, S.T.
Pembina
NIP. 197912212008011012

Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Kabag Pemerintahan Kota Palu



Wawancara Bersama Kepala BPDB Kota Palu



Wawancara Bersama Kadis social Kota Palu



Wawancara Kepada ibu Kasi Surplemen dan imunisasi



Wawancara Kepada Masyarakat Huntap Tondo



Sumber : CNN indonesia



Sumber : BBC New Indonesia